



APEKSI

DOKUMENTASI BEST PRACTICE

KOTA-KOTA

2015



we serve the best to cities

**DOKUMENTASI BEST PRACTICE KOTA-KOTA
TAHUN 2015**

Diterbitkan oleh:

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Rasuna Office Park III, Lantai 3, Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan
Jakarta 12960 - Indonesia
Tel. +62 (0)21 8370 4703, 9390 3890
Fax. +62 (0)21 8370 4733
Email: info@apeksi.or.id
Website: www.apeksi.or.id

Penanggung Jawab:

Dr. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si
H. Suyanto

Tim Penulis:

Sri Indah Wibi Nastiti
Tri Utari
Heffy Octaviani
Imam Yulianto
Devy Munir
A. Nur Fitri Balasong

ISBN 978-602-72187-0-3

DOKUMENTASI BEST PRACTICE

KOTA-KOTA

TAHUN 2015

**Sanksi Pelanggaran Pasal 44:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100,000,000 (Seratus Juta Rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Copyright © 2015 by APEKSI

All right reserved under International Copyright Convention. No part of this book may be reproduced or transmitted in many form or by means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any other information storage and retrieval system, without written permission from publisher.

Funding for this publication is provided by APEKSI



APEKSI

PENGANTAR

Inovasi adalah terobosan yang menjadi kebutuhan bagi pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Daerah membutuhkan kepala daerah yang inovatif dan memiliki kreativitas, didukung dengan anggaran yang kuat dan mampu berimprovisasi terhadap potensi daerahnya sehingga akan melahirkan kota yang maju dan bermartabat.

Otonomi daerah sebagai pintu gerbang bagi kepala daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menggali berbagai kebutuhan, meramu dalam implementasi program dan kegiatan, mewujudkan program pembangunan yang maju dan masyarakat mandiri.

Banyak pemerintah kota di Indonesia yang meraih prestasi baik penghargaan nasional maupun internasional sebagai pengakuan terhadap keberhasilan pemerintah kota dan jajaran dalam proses pelaksanaan pembangunan yang inovatif. APEKSI sebagai wadah dari pemerintah kota menjangkau berbagai informasi terhadap praktik baik program kegiatan kota dan menjalin komunikasi agar praktik baik tersebut dapat didokumentasikan. Praktik baik tersebut terangkum dalam sebuah Dokumentasi *Best Practice* Kota-Kota di Indonesia yang merupakan program rutin APEKSI. Dalam menginventarisasi informasi dari kota, kami melakukan berbagai tahapan eksplorasi dari berbagai media baik internet maupun berkirim surat ke kota, turun lapangan, verifikasi, dan konfirmasi.

Buku Dokumentasi *Best Practice* Kota-Kota di Indonesia Tahun 2015 (Jilid 10) ini, menghadirkan berbagai tema praktik terbaik kota dalam mewujudkan pelayanan inovatif terhadap masyarakat. Edisi kali ini meliputi program dari berbagai bidang. Kami dari tim penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses penyusunan buku jilid 10 ini, untuk itu kami selalu terbuka untuk menerima masukan, saran dan kritik sebagai perbaikan untuk program ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro, Kota Pekalongan, Kota Kendari, Kota Tarakan, Kota Surabaya, Kota Surakarta dan seluruh pihak lain atas segala dukungan dan kerjasama dalam proses penyusunan buku ini.

Jakarta, Desember 2014

Tim Penulis



SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS

Otonomi daerah idealnya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kepala daerah diharapkan menjangkau setiap permasalahan, kebutuhan, tantangan daerahnya ke dalam program pembangunan untuk mencapai masyarakat yang maju dan sejahtera. Implementasi program dan kegiatan yang transparan, akuntabel dan keberlanjutan merupakan paket pembangunan yang menjadi keharusan. Semua proses ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan, lokalitas, sumber daya manusia, aparatur dan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Saat ini banyak pemerintah kota sudah menerapkan program dan kegiatan yang inovatif dengan dampak serta implikasi besar terhadap masyarakat didaerahnya. Butuh kemauan, kemampuan, sinergitas baik ke dalam, antara pemerintah kota dan kabupaten maupun dengan pemerintah pusat. Perubahan nyata adalah tuntutan masyarakat saat ini, tak sedikit pemerintah kota yang sudah mampu berbuat banyak dalam pembangunan daerahnya. Banyak terobosan, berbagai prestasi dan penghargaan didapat. Seyogyanya bukanlah award atau penghargaan yang ingin dicapai namun lebih pada bukti nyata keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Kendala, tantangan dan permasalahan setiap daerah bervariasi, kepala daerah dan jajarannya yang dapat meramu semua hal ini dalam program dan kegiatan yang inovatif. Oleh karena itu, APEKSI memiliki Program *Best Practices* sebagai media dalam mendokumentasikan praktik-praktik terbaik kota dalam sebuah buku. Setiap tahun APEKSI membuat Dokumentasi Buku *Best Practice* yang harapannya adalah memberi inspirasi bagi pemerintah kota lain dalam berbagai program inovatif. Tak hanya dalam bentuk buku namun APEKSI juga memiliki Program *Best Practice Transfer Program (BPTP)* yaitu program proses transfer dari satu kota kepada kota model lain untuk direfleksikan sesuai kondisi daerah yang akan mereplikasi. Saat ini APEKSI sedang menjalankan Program *BPTP* dalam bidang lingkungan khususnya perubahan iklim. Sehingga tidak hanya mendokumentasikan praktik terbaik saja namun juga sudah pada proses belajar dan transfer antar kota.

Buku Dokumentasi *Best Practice* Kota-Kota Tahun 2015 (Jilid 10) diharapkan mampu mempromosikan keberhasilan para pemerintah kota dan menularkan praktik-praktik terbaik kepada pemerintah kota lain sebagai pemicu dalam proses pembangunan. Penulisan dalam dua bahasa agar mampu lebih memperluas penyebaran informasi keberhasilan kota-kota hingga jaringan internasional.



Ketua Dewan Pengurus
Dr. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA
Walkota Manado



Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam pendokumentasian *best practice* ini, namun pembelajaran dan perbaikan akan terus kami lakukan. Demikian juga dengan proses *Best Practice Transfer Program (BPTP)*, namun dengan pembelajaran proses yang telah berjalan dan masukan dari berbagai pihak yang mendukung, diharapkan kualitas dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Namun dengan proses transfer yang dikembangkan diharapkan terus dikembangkannya proses belajar, transfer pengalaman tersebut, sehingga mampu membangun kerjasama antar daerah yang tujuannya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Desember 2014

Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH., M.Si., DEA
Ketua Dewan Pengurus APEKSI



DAFTAR ISI

PENGANTAR	IV
SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
IMPLEMENTASI <i>E-GOVERNMENT</i> KOTA PEKALONGAN (<i>OPEN SOURCE</i>).....	1
PENJARINGAN USULAN PEMBANGUNAN KOTA METRO MELALUI KEGIATAN BEDAH APBD	13
TABUNGAN LINGKUNGAN (TALING) KOTA TARAKAN.....	21
KOTA SURAKARTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK.....	32
<i>GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)</i> KOTA SURABAYA.....	47
PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI ENERGI ALTERNATIF KOTA KENDARI	61



APEKSI

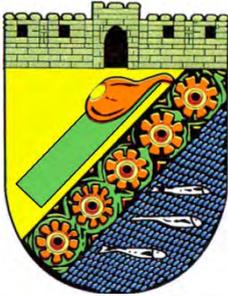


we serve the best to cities



IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT KOTA PEKALONGAN (OPEN SOURCE)

Profil Kota



Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 37' 55" - 109 42' 19" Bujur Timur serta East berkoordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km 518.00 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah:

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Timur: Kabupaten Batang
- Sebelah Selatan: Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Barat: Kabupaten Pekalongan

Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 Km² (0,14% dari luas wilayah Jawa Tengah), 4 Kecamatan: 47 Kelurahan menjadi 27 Kelurahan (2014). Jumlah penduduk 302.888 Jiwa (SIAK Dukcapil – 2014).

Situasi Sebelum Inisiatif

Pada saat belum diterapkannya implementasi *e-government* sebelum tahun 2008, Kota Pekalongan menggunakan *software* yang *illegal*/bajakan. Mulai dari *office application*

97% bajakan, *operating system* 88% bajakan, aplikasi khusus 99% bajakan, penggunaan *software illegal* ini bertentangan dengan Undang Undang (UU) No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selain melanggar UU juga menjadi teladan buruk bagi pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut memotivasi Pemerintah Kota Pekalongan untuk mulai merubah paradigma aparatur pemerintah kota dan masyarakat, diawali dengan manajemen barokah artinya bekerja dengan barang "halal/resmi" menjadikan organisasi birokrasi sebagai organisasi pembelajar.

Dengan *software legal* harapannya dapat mengantisipasi gangguan pelayanan publik akibat pelanggaran UU No. 19 Tahun 2002 serta mewujudkan efisiensi, legalitas, kemandirian dan kemudahan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi).

Inisiatif

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan Penerapan *Legal Software Berbasis Free Open Source (FOSS)* dengan filosofi Manajemen Barokah.



Tujuan gerakan FOSS ini adalah mewujudkan legalitas dalam pemanfaatan TIK, mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan TIK, mewujudkan kemudahan-keberlanjutan operasi-pengembangan TIK dalam jangka panjang, ikut mendorong kemandirian dalam pengembangan TIK bagi pembangunan, mewujudkan manajemen barokah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, mendorong Pemerintah Kota Pekalongan untuk merubah sikap, pola pikir dalam belajar hal-hal baru yang adaptif, inovatif terhadap dinamika lingkungan strategis, membangun kesadaran *ICT (FOSS) as enabler* (tanggap Teknologi Informasi), *accelerator*, *transformator* pembangunan.



Moto dan Semangat Program Teknologi Informasi (TI) Kota Pekalongan

Strategi yang Dijalankan

Pemerintah Kota Pekalongan melakukan pengembangan TIK pada bulan Agustus 2008, dengan pencaangan salah satu program unggulan berupa migrasi ke *legal software* berbasis *free open source software/foss* dengan target tuntas pada pertengahan tahun 2010. Sebelas (11) strategi setelah pencaangan ini adalah:

Tahun 2008- 2012

1. Membangun filosofi sesuai kearifan lokal

Filosofi: Manajemen Barokah – Kultur religius masyarakat Kota Pekalongan

2. Keteladanan organisasi atasan

- Penyusunan rencana strategis TIK Pemkot Pekalongan untuk panduan pembangunan TIK jangka menengah, yang selesai



disusun tahun 2009 (Perwal 49/2009 tentang Renstra TIK Kota Pekalongan 2009-2013).

- Pembangunan jaringan lokal (intranet/Lan), yang diberi nama **Jaringan BatikNet**. telah berhasil dibangun 155 titik yang menghubungkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan, Sekolah (SMA/SMK/SMP Negeri), Puskesmas, dan beberapa lembaga lain, seperti Rusunawa, PMI dan lain-lain.



Ruang server yang terintegrasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan

Tahun 2011- 2013

1. Pentahapan dan kebijakan yang jelas dan terukur

Migrasi

- Tahun 2008- 2009 inisiasi awal (Aplikasi Perkantoran)
- Tahun 2010 berhasil menuntaskan migrasi ke FOSS aplikasi perkantoran pada level SKPD (Dinas, Badan, Kantor_33 unit kerja)
- Tahun 2011 tuntas pada level non SKPD (Kelurahan, UPT, Sekolah Negeri_khusus sekolah *Double Booting*, sebanyak 174 unit kerja)
- Pembudayaan FOSS ke sasaran non birokrasi (masyarakat luas) melalui jalur pendidikan: pelatihan dasar-dasar *open source* bagi semua tenaga pendidik, lebih kurang 2.000 guru (sekolah negeri/swasta) masing-masing. Persiapan pengenalan FOSS sejak dini di sekolah (lab sudah *Double Booting*)
- Tahun 2012 pemantapan- keberlanjutan (aplikasi khusus)
- Aplikasi perkantoran (Olah kata, Olah angka, dan olah presentasi) dan untuk aplikasi khusus (SIM Keuda/ APBD). Untuk aplikasi khusus SIM Keuangan, juga telah digunakan untuk penyusunan RAPBD 2013.
- Tahun 2011-2013: migrasi SIM manajemen dan layanan RSUD Bendan
- Tahun 2012-2013: migrasi SIM gaji PNS dan SIM kepegawaian
- Integrasi SIM perencanaan (Bappeda) dengan SIM keuangan
- Tahun 2013: pengembangan SIM keuangan berbasis akrual



2. Penyiapan SDM secara berkelanjutan

Melakukan peningkatan kompetensi SDM TIK aparatur dan *E-literacy* masyarakat. Karena belum optimalnya daya dukung SDM TIK, baik secara kuantitas maupun kompetensi teknis, maka dikembangkan kemitraan dengan berbagai pihak oleh Pemkot Pekalongan, baik stakholder lokal (komunitas, perguruan tinggi, SMK-SMK, MGMP, dan lain-lain) maupun dari stakeholder pusat (kementerian, lembaga, asosiasi, komunitas dan lain-lain). Selama 2011 dan 2012, diselenggarakan pelatihan TIK untuk masyarakat dan aparat hampir setiap hari di BLC (*Broadband Learning Center*)

10. Pada Tahun 2011 telah dilatih 2000 orang sedangkan 2012 sebanyak 3000 orang.

3. Pengembangan Kemitraan

Bersama SMK dikembangkan kemitraan tentang Teknik Komputer Jaringan (TKJ) per kecamatan, Himpunan alumni STMIK Widya Pratama, Dewan TIK Kota Pekalongan, Komunitas *Open Source*, Pembina Pusat KPLI, Kemkominfo, BPPT, Kemenristek, AOSI.

4. Penyusunan Kerangka Legal (Regulasi)

Regulasi/Kebijakan: Pemerintah Kota Pekalongan membuat sepuluh (10) Peraturan Walikota untuk memperkuat legalisasi kebijakan *open system dan open source* dalam pengembangan TIK.

5. Melakukan Penataan Kelembagaan

- Pada tahun 2008, satuan kerja (Kelembagaan di lingkup pemerintah daerah) yang menangani TIK adalah Bidang PDE (Pengelolaan Data Elektronik) dalam Kantor Badan Arsip, Data Elektronik dan Perpustakaan (Bardepusda).
- Untuk mendukung kapasitas kelembagaan satuan pengelola TIK, pada masa awal penerapan TIK (2008-2009) dibentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Asisten II Sekda (Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra) beranggotakan 17 orang dari berbagai satuan kerja yang dipandang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mengkaji dan merumuskan alternatif-alternatif kebijakan TIK untuk diputuskan oleh wali kota. Tim ini ditetapkan dengan SK Wali Kota yang kemudian disebut TIM 17.
- Tim ini menjalankan fungsi yang sedikit banyak saat ini dikenal sebagai 'komite TIK', karena dalam konstelasi birokrasi daerah, dapat dikatakan semua kebijakan strategis daerah dirumuskan dan dibahas melalui kelembagaan Setda (Sekretariat Daerah).
- Mulai tahun 2009, seiring dengan terjadi reorganisasi Pemda, satuan kerja pengelola TIK ditransformasi menjadi Unit Kerja (BPDE) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dalam Lingkungan Sekretariat Daerah.
- Pada saat yang sama juga dibentuk Bidang Komunikasi dan Informasi di Dinas Perhubungan (Dishubkominfo-parbud), dengan fokus tugas pada penanganan jaringan telekomunikasi komersial.
- Daya dorong kebijakan relatif lebih kuat karena langsung berada di bawah Sekda, dan pada saat yang sama Ketua Tim 17 mengalami promosi menjadi Sekda, sehingga kemudian Tim 17 tersebut bertransformasi menjadi Tim TIK Kota Pekalongan,



dengan ketua Sekretaris Daerah (Sekda) peran yang kurang lebih sama sebagai apa yang dalam tata kelola TIK dikenal sebagai Komite TIK dewasa ini.

- Pada tahun 2011 kelembagaan pengelola TIK di Kota Pekalongan dirubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemilihan dalam bentuk 'dinas' menegaskan konsepsi sebagai 'pelaksana teknis' urusan pemerintahan.
- Pada periode inilah kemudian dibentuk kelembagaan baru yaitu *CIO (Chief Information Officer)* – Pemimpin tertinggi dalam bidang TIK dan Komite TIK melalui Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 020/035 Tahun 2011 tentang Pembentukan CIO dan Komite TIK Kota Pekalongan.
- Dalam penetapan ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota diposisikan sebagai 'CIO' dan Sekretaris Daerah, yang tadinya sebagai "Koordinator/Ketua Tim TIK/Tim 17" pada kelembagaan yang baru diposisikan sebagai 'Ketua Harian CIO'.
- Sebagai bagian dari kelembagaan TIK untuk proses pengambilan kebijakan TIK, disamping CIO, Komite TIK, di Kota Pekalongan juga dibentuk kelembagaan yang dinamakan Dewan TIK Kota Pekalongan, yang dibentuk tahun 2011 (Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 020.05/70 Tahun 2011), dengan keanggotaan sepenuhnya dari stakeholder TIK Daerah Non Birokrasi (Non Pemerintah Daerah), dengan peran pokok ada 2 yaitu (a) memberikan rekomendasi kebijakan TIK kepada Wali Kota, dan (b) melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang TIK.
- Pembiayaan lembaga ini dialokasikan melalui APBD. Sembilan kategori stakeholder TIK Daerah duduk dalam Dewan TIK ini, yaitu: (1) Unsur Perguruan Tinggi (saat ini menjadi Ketua 2011-2013: Ketua STMIK Kota Pekalongan); (2) Lembaga Pendidikan TIK (Formal/Non Formal); (3) Pers/ Media Massa/Wartawan; (4) Asosisasi Dunia usaha/Industri/Profesi TIK; (5) Pengelola program Strategis TIK; (6) MGMP TIK/TKJ/KKPI SMA/SMK; (7) MGMP TIK SMP/SD; (8) Pakar/ Praktisi/ Pemerhati / Komunitas TIK; dan (9) tokoh masyarakat.
- Dewan ini melakukan berbagai diskusi, observasi dan pelatihan pelatihan TIK di masyarakat, dan menjadi 'mitra sinergis strategis' pemkot dalam pembangunan TIK.
- Pada saat yang sama, di SKPD juga terdapat Tim Teknis TIK SKPD. Tantangan terbesar tentu adalah membangun koordinasi dan platform yang sama dalam pengembangan TIK diantara berbagai Tim tersebut. Peran visi dan arahan CIO menjadi penting dalam suasana ketika level teknis dan manajerial kesulitan membangun titik temu dan sinergi. Namun setelah itu tentu dibutuhkan kapasitas implementasi yang juga tidak ringan.
- Pada September 2014 dipecah menjadi 2 SKPD yaitu Dinas Komunikas dan Informatika (plus bagian Humas) dan Kantor Riset Teknologi dan Inovasi (Gabungan Bidang Inovasi Diskominfo dengan Bidang Litbang Bappeda).



6. Penyusunan Kerangka Legal (Regulasi)

Dalam rangka menegaskan mandat dan memperjelas kebijakan pembangunan TIK, maka pada kurun waktu 2008-2012 Pemkot Pekalongan menerbitkan sekitar 25 Peraturan/Keputusan Walikota terkait TIK/e-government. Dan terakhir pada tahun 2012, Kota Pekalongan menyusun dan menetapkan produk hukum tertinggi daerah terkait dengan TIK, yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2012, yang didalamnya mengatur tentang berbagai aspek strategis pembangunan TIK dalam pembangunan daerah. Perwal migrasi ke *Legal Software* dan FOSS, Penetapan distro UBUNTU, pakta integritas, Tim *help desk*, tim penggerak kepatuhan.

7. Penyiapan Database Teknis secara komprehensif

Setiap komputer diberi nomor identitas, beserta status dan spesifikasinya (diberi karti sensus) dan pemegang/penanggung jawab.

8. Pengembangan *E-Leadership*

- Peningkatan *e-Literacy* (melek TIK) pimpinan SKPD;
- Mendengar suara yang benar (ahli);
- Melawan pesimisme.

9. Pengembangan Sistem Pengamanan Implementasi

- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dan rapat koordinasi secara rutin;
- Tim penegak kepatuhan;
- Menggalang kemitraan dengan komunitas;
- Pelatihan sepanjang tahun terkait FOSS;
- Fasilitasi dan asistensi.

Dalam mengembangkan program ini tentu tidak luput dari hambatan/kendala yang dihadapi seperti *mindset* atau pola pikir masyarakat. Awalnya terjadi banyak penolakan baik dari masyarakat maupun dari internal Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses panjang implementasi program ini.

Untuk itu dilakukan terus berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Terus memperbanyak pelatihan-pelatihan mengoperasikan program seperti Linux dan sebagainya;
2. Membangun BLC (*Broadband Learning Center*) sebagai wadah bagi pendidikan masyarakat, pusat komunikasi masyarakat yang dilakukan baik oleh relawan IT maupun relawan masyarakat, Pusat Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)/ICT (*Information Technology and Communication*) kerjasama Pemkot Pekalongan dengan PT Telkom. Tujuannya adalah:
 - Meningkatkan 'melek TIK' masyarakat Kota Pekalongan.
 - Meningkatkan akses masyarakat kepada TIK.
 - Membangkitkan kejayaan Kota Pekalongan melalui sektor TIK.



Broadband Learning Center (BLC) Kota Pekalongan



Peserta belajar TI di BLC Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan

3. Dibangunnya Taman Bacaan dan Telecenter yang terkoneksi dengan Pemerintah Kota untuk internetnya di setiap RW.



Taman Bacaan dan Telecenter

Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari program yang telah dikembangkan antara lain:

1. Efisiensi untuk aplikasi perkantoran dari Rp 32 Miliar menjadi Rp 17 Miliar.
2. Efisiensi untuk aplikasi khusus yang umum (Anti Virus, Olah Photo) sebesar Rp 34 Miliar.
3. Efisiensi aplikasi sangat khusus (Olah Video; Animasi; Arsitektur; GIS, dan lain-lain) – sampai hingga Rp 50 Miliar.
4. Legalisasi peralatan Teknologi Informasi Komputer (TIK).
5. Kemandirian Teknologi dimana SIM berkode terbuka dan mudah dikembangkan. adalah sebagai berikut:

Secara umum sebagai aplikasi/software/SIM dalam dunia TIK dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: **Pertama**, aplikasi/software yang berkode tertutup dan berlisensi (berbayar), dan **Kedua**, yang berkode terbuka (tidak berlisensi) atau *open source* dan umumnya tidak berbayar (*free*). Untuk yang kedua ini istilah yang tepat adalah *Free/Open Source Software*, (F/OSS), karena



ada juga yang *Open Source Software* (OSS), tetapi tidak *free* atau tetap berbayar.

Pada kasus *pertama*, pada aplikasi-aplikasi yang berbayar dan berkode tertutup, maka aplikasi itu hanya dapat digunakan sebagaimana yang ditentukan oleh pihak pabrikannya, dan kode sumber (kode akses untuk masuk ke rangkaian kode-kode programnya) tertutup (tidak dibuka untuk umum, hanya diketahui oleh pabrikannya atau pembuatnya).

Istilah lainnya yang paling digunakan untuk menamakan jenis *software* berbayar, berlisensi dan berkode terbuka ini adalah *PROPRIETARY SOFTWARE/PROPRITARY APPLICATION*. Sementara, untuk aplikasi/sim/software yang FOSS kode programnya (kode sumbernya) dibuka (terbuka) dapat dibuka oleh siapa saja sehingga kita dapat masuk ke dalam rangkaian kode-kode (koding) penyusunan program/ aplikasi tersebut, sehingga dapat dimodifikasi, diubah atau disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan atau keinginan pengguna, dalam dunia IT sebuah aplikasi atau program atau software yang *proprietary* (tertutup), misal *power point*, *word* atau *excel*, semua menu yang ada atau kelihatan, pada dasarnya hanyalah tampilan luar saja, kode-kode yang menentukan tampilan itu semuanya ada bawah (tak kelihatan) dalam bentuk kode-kode dalam sistem yang *proprietary* kode akses untuk masuk ke kode-kode tersebut tidak dibuka untuk umum.

Sementara dalam aplikasi FOSS kode sumber atau kode akses tersebut dibuka sehingga kita bukan saja bisa mengubah kode-kode tersebut (eksperimen), namun juga bisa belajar bahwa sesuatu kode tertentu menghasilkan tampilan-tampilan tertentu di permukaan, disinilah letak maksud bahwa sistem FOSS membuka kemandirian karena mudah kita kuasai sendiri dan sekaligus membuka kemungkinan untuk mudah dikembangkan (membuka peluang berinovasi dan berkeaktivitas).

6. Efisiensi *Operating Sistem & Office Application* hingga Rp 17 Miliar.
7. Efisiensi aplikasi-aplikasi khusus dan umum (olah foto dan anti virus) dan sebagainya hingga Rp 34 Miliar.
8. Efisiensi aplikasi spesifik (Olah Video, Disain, arstiktur, dan lain-lain) hingga Rp 50 Miliar.
9. Menimbulkan banyaknya bisnis baru terkait perlengkapan dan peralatan pendukung *software linux*.
10. Menumbuhkan peningkatan ekonomi dengan profil sebagai berikut:

Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
3,13%	4,78%	5,51%	5,45%	5,6%	5,89%

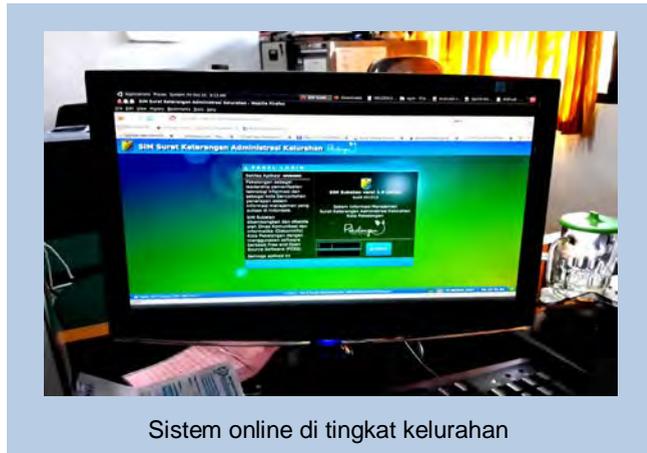
11. Tingkat kemiskinan berkurang dengan profil sebagai berikut:

Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
10,29%	8,56%	9,37%	10,04%	9,47%	8,26%

12. Sistem *online* di tingkat kelurahan sudah berjalan baik dan terintegrasi. Layanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk pengurusan surat keterangan tidak mampu terjadi perbaikan lamanya waktu pengurusan dari



10-15 menit menjadi 3 menit untuk membuat surat. Hal ini karena data seluruh warga Kota Pekalongan sudah terdaftar di Data Center Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekalongan secara online, sehingga pengurusan pelayanan publik hanya dengan mengetik NIK (Nomor Induk Kependudukan)



Sistem online di tingkat kelurahan

saja akan langsung muncul data-data warga secara lengkap.

13. Di bidang kesehatan yaitu Puskesmas dengan diberlakukannya sistem rujukan secara *online* dengan nama Seruni (Sistem Rujukan *Online*).
14. Pengembangan *digital office* yang menyebabkan penggunaan kertas dalam surat menyurat jauh berkurang. Setiap pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan memiliki akses sendiri-sendiri untuk mengirim/menerima surat resmi, begitu juga dengan disposisi terhadap surat atau undangan dapat langsung dilakukan secara *online*.
15. Sejumlah prestasi yang telah dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. *Innovative Regional Award* (Pembangunan Berbasis IPTEK) 2011 (BPPT Kemenristek Kabupaten/Kota);
 - b. *Innovating Leadership Awards* (Kepemimpinan Inovatif Berbasis IPTEK – 2011 (BPPT - Kemenristek);
 - c. ICT Pura (ICT/TIK – Teknologi Informasi dan Komunikasi) – Adipura Bidang TIK 2011 (Kemenkominfo, 30 Kabupaten/Kota);
 - d. Juara 1 Nasional IOSA Tahun 2011 – TIK *Open Source* (Kemenkominfo, 10 Kabupaten/Kota);
 - e. Peringkat I PEGI (*Pemeringkatan E-Gov*) Kabupaten/Kota Se-Jateng, Kemenkominfo 2011);
 - f. IOSA Award 2010, Kategori Penghargaan Khusus Pengembangan Kemitraan (Kemkominfo RI);
 - g. BLC (*Broadband Learning Center*) Juara III Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis TIK (PT. Telkom 2011);
 - h. Satu dari 2 Kabupaten/Kota yang menerapkan SIM Keuangan Daerah (APBD) Berbasis FOSS di Indonesia);
 - i. Juara I Nasional IOSA 2012 (*Indonesia Open Source Award*) – TIK *Open Source* (10 Kab/Kota);
 - j. *Tokoh Open Source* Nasional 2012 Kategori Tokoh Pemerintahan (Kemenkominfo: 3 Tokoh Pemerintahan; Pendidikan; Komunitas);
 - k. Peringkat I PEGI (*Pemeringkatan E-Gov*) Kabupaten/Kota Se-Jateng 2012);
 - l. *E-Government Award* – TIK (2011) (Kemenkominfo; 6 Kabupaten/Kota Lain);



- m. KPID Award 2012 (7 Kabupaten/Kota Se-Jateng);
- n. Ki Hajar Award (Penerapan TIK Untuk Pendidikan) (Kemendiknas, 2013);
- o. Kota Percontohan Penerapan *E-Gov Berbasis Open Source* (2013, Menristek);
- p. Rekor Dunia MURI, Kategori Pemda Terbanyak Mengembangkan dan Memanfaatkan Aplikasi OSS (Yayasan MURI, 2013);
- q. Juara I Nasional Pos Layanan Teknologi (Posyantek) – dalam rangka Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 2013 (Kemendagri & Kemenristek);
- r. Adikarya Pengabdian SEWAKA (Kemenkominfo, 2013);
- s. *E-Government Berbasis* Teknologi Terbuka (2014, Forum Ubuntu Indonesia);
- t. *E-Leadership Award* (Kepeloporan dan Kepemimpinan TIK) (2014; Forum Ubuntu Indonesia);
- u. Percontohan Penerapan Erekapitulasi Pemilu Legislatif (2014, BPPT RI).



Walikota Pekalongan menerima Penghargaan e-Leadership Award dari Forum Ubuntu Indonesia



Pemerintah Kota Pekalongan Terima Penghargaan e-Rekapitulasi dari BPPT

Keberlanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan program ini maka sejumlah payung hukum telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan:

Dasar Hukum Migrasi FOSS:

Tingkat Pusat:

1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. SE Menkominfo No. 05/SE/Kominfo/10/2005 tentang Kewajiban
3. Pemakaian & Pemanfaatan Penggunaan *Legal Software Open Source/Proprietary* di Lingkungan Instansu Pemerintah
4. Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software*
5. Surat Edaran Menristek No. 030/M/IV/2009 tentang Tindak Lanjut Migrasi Open Source di Instansi Pemerintah



Tingkat Daerah:

1. Perwal Pekalongan No. 12A/2010 tentang Migrasi Perangkat Lunak Berbasis FOSS
2. Kepwal Pekalongan No. 020/024 tentang Kewajiban Pemakaian dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan FOSS di Lingkungan Pemkot Pekalongan
3. SK Walikota: Petunjuk Umum Migrasi; Pembentukan *Help Desk*, Tim Monev Migrasi, dan lain-lain.

Untuk memantau perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini maka dibentuk Tim Pelaksana Kepatuhan yaitu Satpol PP (pertama kali sebagai percontohan setelah PDE/Kominfo) dengan harapan jika Satpol PP yang selama ini memiliki kesan hanya berinteraksi dengan persoalan-persoalan di lapangan ternyata juga mampu mengoperasikan dan memahami krusialnya komputer dan pengembangan program ini, maka kemudian Satpol PP akan difungsikan untuk merazia program-program perangkat lunak selain Linux, demikian juga diharapkan Satpol PP juga mampu menjadi penegak pelaksanaan Perda di daerah. Selain Satpol PP, adalah Inspektorat dan Diskominfo sebagai pelaku monitoring dan evaluasi Program FOSS di Kota Pekalongan.

Pelajaran yang Dapat Diambil

Dalam menjalankan program diperlukan kesamaan visi dan pola pikir, komitmen yang kuat dari kepala daerah didukung oleh perangkat Kota Pekalongan dan stakeholder, sebagai upaya membangun kota yang visioner dimana masyarakat dapat merasakan dampak positif dan berpola pikir terbuka terhadap perubahan-perubahan yang positif. Diakui untuk mampu mewujudkan hal tersebut, membutuhkan waktu dan tenaga memiliki komitmen kuat untuk menuju perubahan positif dan berkelanjutan.

Kemampuan Tular

Program ini dapat diterapkan di kota lainnya, hal-hal yang perlu diperhatikan jika ingin menerapkan program ini adalah:

1. Memiliki visi dan komitmen kuat yang sama-sama untuk dipedomani, komitmen sangat penting dalam membangun visi.
2. Membangun manajemen yang dapat diterjemahkan dalam program, mekanisme, SOP, prosedur, proses/tahapan (program aksi).
3. Teknis pelaksanaan (mewujudkan sikap, perilaku dan budaya) sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
4. Kebijakan dan regulasi, Aspek tata kelembagaan, mempersiapkan tim, tata kelola, dan teknis, Aspek perencanaan (rencana kerja) membuat skenario besar yang komprehensif (perencanaan jangka menengah).
5. *E-literacy (capacity building)* peningkatan kapasitas SDM yang mengelola IT, Sarana prasarana dan aplikasi dan Mempersiapkan data yang lengkap, agar dapat mengukur keberhasilan dari setiap tahapan-tahapannya (*assessment*).

Kota dan kabupaten yang telah melakukan kunjungan belajar ke Kota Pekalongan adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Karawang, Kota Tangerang, Kota



Palembang, Kota Bukittinggi, Bappeda Kota Cirebon, Bappeda Kabupaten Japara, Provinsi Riau, Kabupaten Boyolali, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Buleleng, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bantul, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pati, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batang, Kabupaten Trenggalek, Kota Bandung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Kediri.

Kontak

1. **Dr. Sri Budi Santoso, M.Si**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kota Pekalongan
Email: sribudis.12@gmail.com
HP: 08159946937

2. **Heffy Octaviani**

Manager Peningkatan Kapasitas
Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960
Telp. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733
HP: 0818798037
Email: octaviani.heffy@apeksi.or.id



PENJARINGAN USULAN PEMBANGUNAN KOTA METRO MELALUI KEGIATAN BEDAH APBD

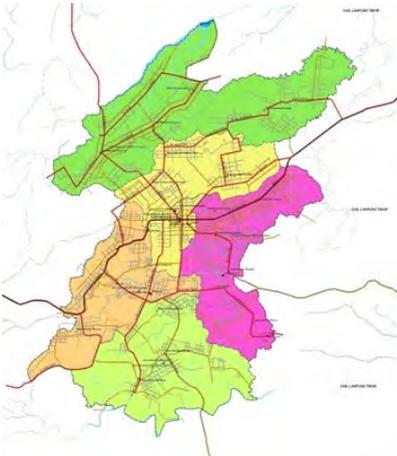
Profil Kota



Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung).

Merupakan kota terbesar kedua setelah Bandar Lampung. Sebelum menjadi kota otonom, Metro merupakan kota administratif yang berfungsi sebagai ibukota Lampung Tengah hingga tahun 1999.

Kota Metro terbagi menjadi 5 kecamatan dan 22 Kelurahan:



1. Kecamatan Metro Pusat terdiri dari 5 Kelurahan antara lain (Kelurahan Metro, Imopuro, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, Yosomulyo)
2. Kecamatan Metro Barat terdiri dari 4 Kelurahan (Kelurahan Mulyojati, Mulyosari, Ganjarasri, Ganjaragung)
3. Kecamatan Metro Timur terdiri dari 5 Kelurahan (Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Iring Mulyo, Yosodadi, Yosorejo)
4. Kecamatan Metro Utara Terdiri dari 4 Kelurahan (Kelurahan banjarsari, Karangrejo, Purwosari, Purwoasri)
5. Kecamatan Metro Selatan terdiri dari 4 Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo, margorejo, Margodadi, Sumpersari)

Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.



Situasi Sebelum Inisiatif

Sebelum lahirnya kegiatan bedah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Kota Metro telah melaksanakan pembangunan partisipatif melalui mekanisme Musrenbang. Namun dalam Forum Musrenbang, tingkat partisipasi masyarakat cenderung belum optimal. Masyarakat dilibatkan hanya pada proses perencanaan awal saja, tidak sampai proses implementasi. Selain itu, masyarakat tidak memiliki fokus yang tinggi terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Atau dengan kata lain, ketika informasi pembangunan yang disajikan tidak terlalu rinci, maka masyarakat akan kesulitan untuk merespon secara komprehensif. Sebelum kegiatan bedah APBD, beberapa kegiatan fisik dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut dimungkinkan berasal dari luar Kota Metro.

Inisiatif

Salah satu strategi agar pembangunan terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran adalah dengan melakukan kegiatan Bedah APBD. Inisiatif ini dilakukan oleh Walikota periode tahun 2005-2010, Bapak Lukman Hakim, S.H., M.M. Kegiatan Bedah APBD dilaksanakan oleh Bappeda (Badan Perencana dan Pembangunan Daerah) Kota Metro dan pendanaan masuk dalam kegiatan Sekretariat Bappeda Kota Metro, Sub Bagian Perencanaan. Inisiasi awal Kegiatan Bedah APBD dilakukan pada tahun 2006. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan:

1. Struktur APBD tahun berjalan,
2. Tema dan prioritas pembangunan tahun berjalan dan tahun yang akan datang,
3. Data informasi pembangunan tahun berjalan.

Hal pokok yang penting untuk diketahui oleh masyarakat dalam bedah APBD adalah Informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan serta sumber pendanaannya.

Inisiatif melakukan bedah APBD kemudian berkembang kepada tahapan implementasi yang kemudian diwujudkan ke dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Program ini masyarakat berperan dalam melakukan fungsi kontrol dan evaluasi pembangunan di wilayah tempat masyarakat itu berada. Berdasarkan informasi transparansi anggaran pemerintah daerah yang sudah dipaparkan dalam bedah APBD, maka masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat mempunyai peran untuk melakukan pembangunan langsung diwilayahnya, tidak dilimpahkan lagi kepada pihak ketiga.



Kegiatan Bedah APBD di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur



Strategi yang diterapkan

Kegiatan bedah APBD seperti telah dijelaskan sebelumnya, merupakan media atau *tools* agar proses pembangunan di Kota Metro dapat berjalan tepat sasaran. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, kegiatan bedah APBD telah menjadi bagian rutin yang masuk ke dalam skema atau siklus perencanaan pembangunan. Tahapan kegiatan bedah APBD dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada langkah awal tahun 2006, Bappeda merumuskan kebijakan secara teknis dengan dinas terkait agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Setelah perencanaan pelaksanaan kegiatan sudah matang, maka dilakukan sosialisasi ke 22 kelurahan yang ada di Kota Metro. Sosialisasi dilakukan oleh Walikota, seluruh dinas, camat dan lurah setempat kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ke 22 kelurahan ini dilaksanakan selama dua tahun (2006-2010). Pelaksanaan tahun kedua disempurnakan kembali dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan tahun pertama. Selanjutnya, setelah kegiatan ini terinisiasi, maka pelaksanaan forum Bedah APBD dilaksanakan hanya di 5 (lima) kelurahan di 5 (lima) kecamatan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi.
 2. Persiapan bahan Bedah APBD yang terdiri dari: bahan informasi pembangunan, struktur APBD Kota Metro tahun berjalan, tema dan program prioritas tahun berjalan dan tahun berikutnya. Tahap ini dilaksanakan oleh sub bagian perencanaan Bappeda dengan melibatkan Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Bidang Fisik Bappeda sebagai koordinator bidang pembangunan.
 3. Persiapan landasan hukum dan administrasi kegiatan yang meliputi:
 - Surat-menyurat dan jadwal kegiatan.
 - Surat Keputusan (SK) Walikota tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro
 - SK Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro
 - Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat



Sosialisasi Bedah APBD di Kecamatan Metro Selatan bersama Walikota Metro, H. Lukman Hakim

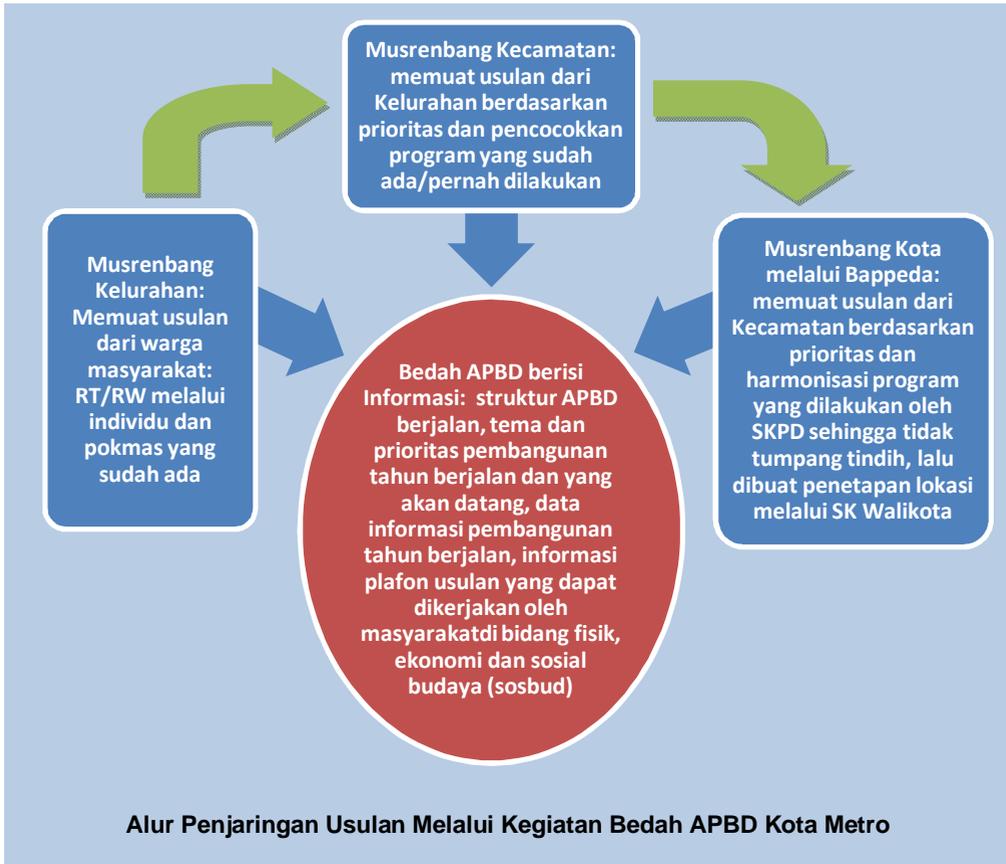


- Keputusan Walikota Tentang Penetapan Lokasi, Jenis Kegiatan dan Besaran Hibah di setiap Kelurahan Se-Kota Metro melalui Program Pemberdayaan Masyarakat
4. Pelaksanaan teknis kegiatan: Walikota beserta jajaran turun ke 5 (lima) kelurahan di 5 (lima) kecamatan untuk melaksanakan forum Bedah APBD. Dalam forum tersebut, Walikota yang diwakili oleh Kepala Bappeda menyampaikan informasi mengenai struktur APBD tahun berjalan, tema dan prioritas pembangunan tahun berjalan dan tahun berikutnya. Selanjutnya Walikota memberikan arahan tentang kebijakan umum pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Acara terakhir adalah tanya jawab antara pemerintah dan masyarakat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk merespon hasil paparan dan arahan.
5. Dalam sesi tanya jawab, masyarakat dibekali dengan bahan informasi pembangunan yang berisi kegiatan-kegiatan fisik, sosial budaya (sosbud), dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Satuan kerja (Satker) maupun Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk tahun berjalan. Data dalam informasi pembangunan ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan saran dan aspirasi masyarakat dalam diskusi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan Bedah APBD dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahunnya.



Diskusi kelompok pada kegiatan bedah APBD

Seperti terlihat pada Alur berikut, terlihat bahwa bedah APBD merupakan *tools* yang digunakan untuk melakukan penjangkaran usulan rencana pembangunan yang dapat dilakukan. Setelah informasi dan data diperoleh, masyarakat kemudian dapat berperan serta aktif dalam melakukan pembangunan di wilayah mereka berada berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat memuat 3 bidang prioritas: Fisik, Ekonomi dan Sosial Budaya (Sosbud).



Hasil yang dicapai

Secara kualitatif kegiatan Bedah APBD telah meningkatkan manajemen pelayanan publik dalam bentuk informasi pembangunan dan transparansi APBD. Adanya kegiatan Bedah APBD dapat menghindari tumpang tindih usulan kegiatan pembangunan setiap tahunnya, sehingga anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dampak yang dirasakan dari adanya kegiatan bedah APBD adalah terbukanya akses masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan berikut besaran anggarannya, serta masyarakat dapat bertemu dan berdialog langsung dengan unsur pimpinan eksekutif maupun legislatif. Jika usulan masyarakat ada yang belum terakomodir maka pertama: dapat dilaksanakan pada tahun berjalan; kedua: dapat dilaksanakan di anggaran perubahan tahun berjalan; ketiga: diusulkan kembali melalui musrenbang untuk tahun berikutnya. Usulan masyarakat yang dapat diakomodir pada tahun berjalan adalah usulan di bidang ekonomi dan sosial budaya melalui mekanisme PPM atau SKPD. Sedangkan usulan fisik, biasanya peluang untuk diakomodir tahun berjalan sangat kecil.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari narasumber, pada awalnya tahun 2006 besaran dana yang diterima oleh masing-masing kelurahan sebesar Rp 1 Miliar, namun setelah 2 tahun dievaluasi dan adanya keterbatasan anggaran



daerah maka pola pemberian dana berubah menjadi Rp 575.000.000/kelurahan daerah tahun 2010-2013, dengan pembagian:

Bidang Fisik	Rp 250.000.000,00
Bidang SosBud	Rp 175.000.000,00
Bidang Ekonomi	Rp 150.000.000,00

Pagu dan Contoh Realisasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat

APBD TAHUN 2013	APBD TAHUN 2014
Rp 575.000.000/Kelurahan	Rp 600.000.000/Kelurahan
Realisasi Kelurahan Ganjar Asri Berdasarkan SK Walikota No. 306/KPTS/SETUA/05/2013	Realisasi Kelurahan Iringmulyo Berdasarkan SK Walikota No. 291/KPTS/05/2014
Rp 630.100.000	Rp 629.080.000
<i>Sumber: Publikasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Tahun Anggaran 2013 Dan 2014, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Metro</i>	

Meski pemerintah telah menetapkan pagu untuk program PPM perkelurahan pada tahun 2013 dan tahun 2014, namun pada kenyataannya ada sedikit tambahan dana, ini dikarenakan kondisi dan tingkat kebutuhan di kelurahan ternyata berbeda-beda.

Contoh usulan program kegiatan PPM, Ekonomi dan Sosbud, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur

URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
Pembangunan jalan lingkungan Jl. Merica 3	RT. 08	1 kegiatan
Pembangunan Paving Block	Gg. Satelit Rt. 35	100 M2
Bantuan Bibit Sapi	Klp. Perintis 3 RT. 13 (Suwanto)	1 Kelompok
Amir (warung pecel)	RT. 04	
Bantuan Pembangunan/Rehab/Sarpras Rumah Ibadah/TPA	Mushola Khairul Amal RT. 13	1 Unit
<i>Sumber: Data Bappeda Kota Metro</i>		

Selain bentuk kegiatan, dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah semakin meningkatnya kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam pembuatan proposal atau pengajuan proyek. Pemerintah Kota dalam hal ini Bappeda memfasilitasi masyarakat dalam pelatihan Fasilitator Kelurahan dan Fasilitator Kecamatan sejak 3 tahun terakhir (Tahun 2010), sampai dengan saat ini terdapat 28 orang telah menjadi fasilitator. Dengan didampingi oleh fasilitator kelurahan atau fasilitator kecamatan, masyarakat telah mampu menghitung dan merencanakan



Pembangunan drainase yg dibuat oleh masyarakat



serta mengimplementasikan kegiatan terutama di bidang fisik. (pembuatan proposal proyek). Masyarakat juga semakin memahami bagaimana alur dan mekanisme perencanaan pembangunan di kota.

Keberlanjutan

Meskipun dari sudut hukum, penguatan hanya berupa SK Walikota, namun model kegiatan yang melibatkan seluruh *stakeholders* ini ternyata memiliki dukungan dan manfaat sosial yang tinggi. Selain itu, Bappeda Kota Metro bersama Dinas terkait telah dan terus melakukan pengembangan pelaksanaan kegiatan. Pada awalnya kegiatan bedah APBD hanya membedah pelaksanaan kegiatan SKPD dari Pos Belanja Langsung, sehingga dihasilkan pagu per kelurahan yang besarnya sama.

Mulai tahun 2014, untuk pembangunan tahun 2015 konsep pagu yang sama per kelurahan diubah dengan memasukkan 4 kriteria baru, yakni (1) jumlah penduduk di kelurahan; (2) jumlah penduduk miskin; (3) luas wilayah; dan (4) tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian nantinya kelurahan mendapatkan porsi yang berbeda-beda. Mekanisme pemberian bantuan di bidang ekonomi juga perlahan mulai disempurnakan melalui sistem bantuan dana bergulir oleh kelompok masyarakat melalui pembentukan Lembaga Keuangan Kelurahan sebagai *supporting system*. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dan menjaga perputaran modal yang diberikan.

Pelajaran yang dapat diambil

Kata kunci dari kegiatan Bedah APBD adalah transparansi, komunikasi dan sinergi. Transparansi, komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan.

Kemampuan untuk ditransfer

Kegiatan bedah APBD sangat bisa untuk ditransfer ke daerah lain. Agar kegiatan bedah APBD dapat dengan mudah dan lancar dilakukan maka daerah memerlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk melaksanakan keterbukaan informasi pembangunan kepada publik. Selain itu diperlukan dokumen perencanaan yang matang mencakup subjek pelaksana, target dan sasaran serta lokasi dan sumber pendanaan.

Keahlian lain yang diperlukan adalah menyediakan fasilitator yang mempunyai kompetensi dalam hal *project management*. Kompetensi ini sangat diperlukan untuk melakukan pendampingan di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan (mendampingi pokmas untuk pembuatan proposal dan Rencana Anggaran Biaya). Tantangan yang dihadapi oleh Kota Metro dalam menjalankan kegiatan bedah APBD adalah pada bidang ekonomi, dimana dana yang digulirkan sebagai bantuan usaha seringkali disalahartikan sebagai pemberian. Untuk itu diperlukan *monitoring* dan verifikasi yang terus-menerus agar masyarakat paham bahwa dana yang diberikan harus dipertanggungjawabkan. Daerah di seputar Provinsi Lampung



(Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur) pernah melakukan studi banding terkait program pemberdayaan masyarakat.

Kontak

1. H. Lukman Hakim

Walikota Metro
Jl. AH. Nasution No. 5, Kota Metro

2. Anita Rahmalia, SH, MA

Sekretaris Badan Perencana dan Pembangunan Daerah
Kota Metro
Jl. AH. Nasution No. 5, Kota Metro
Tel. (0725) 41927

3. Tri Utari

Manajer Advokasi dan Regulasi APEKSI
Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960
Telp. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733
Email: triutari@apekti.or.id



TABUNGAN LINGKUNGAN (TALING) KOTA TARAKAN

Profil Kota



Kota Tarakan, yang secara geografis terletak pada 3o14'23"-3o26'37" Lintang Utara dan 117o30'50"-117o40'12" Bujur Timur, terdiri dari 2 (dua) pulau, yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah mencapai 657,33 Km², terdiri atas wilayah daratan seluas 250,80 Km² dan wilayah lautan seluas 406,53 Km².

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Pesisir Pantai Kecamatan Bunyu
2. Sebelah Timur: Kecamatan Bunyu dan Laut Sulawesi
3. Sebelah Selatan: Pesisir Pantai Kecamatan Tanjung Palas
4. Sebelah Barat: Pesisir Pantai Kecamatan Sesayap

Menurut data tahun 2006, kepadatan penduduk: 716 jiwa/km², pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 1999-2005 sebesar: 7,17% per tahun, pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2006 (dengan Migas): Rp 15.783.741. Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 (dengan Migas): 7,51%.

Salah satu prioritas pembangunan Kota Tarakan adalah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang dengan program-program sebagai

berikut: Rehabilitasi, reboisasi lahan-lahan kritis pada hutan lindung dan hutan kota Pembuatan batas penambahan luas hutan lindung Pengembangan dan rehabilitasi hutan mangrove Survei penelitian potensi sumber daya pesisir dan laut.

Situasi Sebelum Inisiatif

Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya berdampak terhadap peningkatan volume sampah, baik sampah organik maupun non-organik. Peningkatan volume sampah ini belum disertai dengan kesadaran masyarakatnya akan arti pentingnya sampah.

Penghargaan Adipura untuk program kebersihan kota telah beberapa kali diperoleh oleh Kota Tarakan, namun kondisi ini belum menggambarkan kondisi Kota Tarakan yang sebenarnya dalam pengelolaan sampah, baik yang bersumber dari masyarakat umum, kawasan perdagangan, industri, fasilitas publik dan lainnya, terutama lagi di pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan sampah di



TPA hingga saat ini masih menggunakan *sanitary landfill* yang memiliki kelemahan dalam hal keterbatasan lahan. Sementara jumlah TPA di Kota Tarakan hanya ada satu dengan kapasitas daya dukung lingkungan hanya 10 tahun ke depan. Sejak tahun 2008 Pemerintah Kota Tarakan telah memiliki 12 Depo (rumah pengelolaan sampah organik dan sebagian kecil sampah non-organik) di 12 kelurahan, akan tetapi baru 3 Depo yang aktif.

Inisiatif

Pemerintah Kota Tarakan memandang bahwa untuk mengatasi permasalahan sampah diperlukan pemahaman terhadap bernilainya sampah. Dan penyampaian pemahaman dimaksud akan cukup mudah diberikan kepada anak-anak melalui sekolah. Untuk itu, pemerintah kota berinisiatif mengeluarkan program Tabungan Lingkungan (Taling) sekolah. Program tabungan yang dilakukan oleh para siswa dengan menggunakan sampah sebagai alat penukar dengan sejumlah rupiah. Program Taling merupakan replikasi program *eco saver* dari Kota Marikina, Filipina. Pemilihan program *eco saver* Kota Marikina, Filipina atas dasar kesesuaian karakteristik kota yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah dengan melihat luas wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun dalam proses perjalanan program terdapat perbedaan dengan program *eco saver*, dalam hal pembayaran sampah yang telah dikumpulkan oleh para siswa. Dalam program taling, pembayaran dinilai dengan rupiah, sedangkan *eco saver* dibayarkan memakai alat-alat tulis. Selain itu, pengumpulan dan pengangkutan sampah di program Taling dilakukan oleh pihak sekolah dan DKPP meskipun tadinya digagas untuk dilakukan oleh pengepul, sedangkan di program *eco saver* dilakukan oleh pengepul.

Strategi yang Diterapkan

Program ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dituangkan ke dalam Memorandum of Understanding (MoU) No. DCI-NSAPVD/2009/201-064 tanggal 27 Juli 2010 tentang MoU on *The Implementation of The EC-Funded Project "Partnership for Democratic Local Government in Southeast Asia (Delgosea)"* antara Pemerintah Kota Tarakan, APEKSI dan UCLG-ASPAC untuk menjadikan Kota Tarakan sebagai *pilot project* bagi replikasi praktik terbaik kota. Tujuan dari MoU ini adalah untuk memberikan kontribusi perbaikan kondisi lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat di tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan daerah.

Bagi Pemerintah Kota Tarakan, program ini menjadi langkah untuk menyempurnakan program-program kebersihan yang sudah ada sebelumnya. Setelah melalui analisa situasi dan kondisi kota, Program Adiwiyata yang ditujukan ke sekolah-sekolah dapat dipadukan dengan program Taling sebagai nama program yang telah disepakati Pokja dalam workshop replikasi praktik terbaik Kota Marikina, Filipina di Kota Tarakan.

Pemerintah kota membentuk Tim Pokja *Best Practice Delgosea* yang kemudian berubah nama menjadi Tim Pokja Taling yang terdiri dari gabungan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain: Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dan Bagian Pembangunan Sekda, termasuk melibatkan pihak di luar pemerintah seperti akademisi (Universitas Borneo), swasta (Asosiasi Pengepul Rongsokan/Aspero), LPM, masyarakat, Dewan Pendidikan dan media massa



(Harian Radar Tarakan dan Tarakan TV) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Tarakan No. 050/HK-II/65/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Replikasi Praktik Terbaik Kota Marikina, Filipina di Kota Tarakan. Pembentukan Pokja bertujuan untuk merumuskan dan merencanakan program kegiatan dan pembiayaan replikasi *best practice* tersebut. Sedangkan yang menjadi *leading sector* kegiatan ini secara teknis melekat di dinas terkait, yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Bersama dengan proses penyusunan pola proyek tersebut telah dilakukan kajian kebutuhan pelatihan yang dapat membantu Pokja dalam mempertajam pola proyek maupun implementasinya.

Secara perencanaan, mengintegrasikan program tersebut ke dalam program kerja Pemerintah Kota Tarakan tidak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan program tersebut merupakan program pengelolaan sampah yang pada umumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan, akan tetapi khusus yang mengarah kepada siswa-siswi sekolah belum pernah dilakukan. Tantangan yang muncul justru pada saat rencana kerja replikasi dimunculkan di dalam SKPD yang terkait dengan pengelolaan sampah dan pendidikan lingkungan hidup, dimana terdapat 3 (tiga) SKPD yang tergabung dan berkepentingan di dalam replikasi tersebut, yakni DKPP, Dinas Pendidikan dan BPLH dengan disesuaikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kemudian beberapa cara yang dilakukan oleh tim dalam mengintegrasikan program tersebut ke dalam anggaran Pemerintah Kota Tarakan, yaitu:

1. Memasukkan program kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi salah satu SKPD.
2. Tidak melakukan anggaran ganda dengan kegiatan sama beda SKPD sehingga tidak memunculkan kode rekening kegiatan yang sama.
3. Melakukan lobi untuk menguatkan bahwa program kegiatan tersebut akan membawa banyak manfaat, sehingga perlu adanya pemahaman yang sama bagi DPRD sebagai pemegang hak anggaran.
4. Mensinergikan antara Bappeda sebagai unsur perencanaan dengan DKPP, Disdik, dan BPLH sebagai unsur teknis guna bersama-sama mempertahankan pada saat asistensi dengan DPRD.

Selanjutnya pemerintah kota melakukan kegiatan-kegiatan workshop dan sosialisasi, seperti dialog dengan seluruh stakeholders pada bulan Januari sampai Februari 2011, workshop penyusunan rencana kerja dan anggaran workshop I pada tanggal 22-23 Februari 2011 dan workshop II pada tanggal 19-20 April 2011; mengadakan kegiatan-kegiatan berbagi informasi kepada seluruh stakeholders di bulan-bulan setelah pelaksanaan workshop II di bulan April 2011.

Di bulan Maret 2011, BPLH juga mengadakan peningkatan kapasitas bagi guru-guru dimana ide Taling akan dimasukkan dalam peningkatan kapasitas sekaligus mengidentifikasi sekolah-sekolah Adiwiyata yang tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program Taling.

Pada tanggal 27 - 30 Juli 2011 tim pokja berkesempatan melakukan kunjungan ke Kota Marikina, Filipina sebagai kota model. Kegiatan ini dalam rangka pengenalan lebih dekat dan meninjau langsung sekaligus berdiskusi dengan para pelaku program *eco saver* di Kota Marikina di bawah koordinasi CEMO (*City Environmental Management Office*) berupa kantor pemerintah yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan *eco saver*, baik di tingkat sekolah-sekolah maupun di masyarakat umum.



Hasil dari kunjungan ke kota model dan evaluasi proses serta rencana kerja program Taling, maka untuk kepentingan penilaian kinerja pelaksanaan rencana kerja, maka dilakukan pengembangan kerangka kerja. Kerangka kerja digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dirumuskan secara bersama-sama di dalam rapat pokja. Kerangka kerja berisi tahapan-tahapan pelaksanaan program taling sampai terlaksananya program tersebut. Adapun pengembangan kerangka kerja dan integrasi rencana kerja anggaran ke SKPD yang terlibat untuk rencana kerja tahun 2012-2014.

Adapun anggaran yang telah dikeluarkan untuk program tersebut sejak tahun 2012 - 2014 adalah sebagai berikut :

1. DPA Tahun 2012 sebesar Rp 89.615.000 untuk fasilitas Taling, peralatan Taling, Buku Taling, display dan fasilitas penampungan Taling;
2. DPA Tahun 2013 sebesar Rp 40.000.000 untuk penyediaan buku rekening Taling;
3. DPA Tahun 2014 sebesar Rp 270.695.000 untuk pengadaan mobil mini *dump truck*.

Selanjutnya sosialisasi program Taling ke sekolah-sekolah pada tanggal 11 Oktober 2011. Kemudian *pre-launching* program Taling di SDN 018 pada tanggal 7 Januari 2012. Lalu launching program Taling di SMPN 1 tanggal 21 Februari 2012 sekaligus penandatanganan MoU antara DKPP, BPLH, dan Disdik dalam rangka penguatan kelembagaan pengelolaan pelaksanaan program tersebut di sekolah dan diadakan pula penandatanganan antara sekolah dengan Asosiasi Pengusaha Rongsokan (Aspero) dalam rangka pengaturan jadwal pengambilan sampah di sekolah. Khusus untuk pengambilan sampah oleh Aspero, dalam perjalanannya tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan antara biaya pengambilan dan sampah yang terkumpul dinilai kurang signifikan.

Jenis barang bekas (material daur ulang) yang dapat dilakukan penukaran dalam program Taling yang dilaksanakan di sekolah-sekolah pada hari yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

- Kertas
- Karton/kardus
- Buku cetak
- Majalah
- Koran
- Kaleng minuman (softdrink)
- Kaleng aluminium (kaleng susu, makanan, dan lain-lain)
- Kaleng seng (makanan dan minuman)
- Botol plastik minuman mineral
- Botol kaca utuh (kecap, saos, dan lain-lain)
- Plastik bening.



Sampah yang akan didaur ulang

Sementara untuk nilai tukar material daur ulang terhadap nilai rupiah akan mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi harga pasar dan harga yang telah



disepakati antara pihak sekolah dengan para pengepul. Berikut daftar nilai tukar material daur ulang terhadap rupiah:

DAFTAR HARGA DAN JENIS SAMPAH TERBARU 2014

KODE	JENIS SAMPAH	NASABAH	LAPAK
1	Air kemasan gelas / botol bersih		Rp 1,500
2	Accu Motor		Rp 8,000
3	Aluminium Kaleng		Rp 9,000
4	Besi		
	- Drum		Rp 2,000
	- Besi Tebal		Rp 3,300
	- Besi Premium		Rp 3,500
5	Buku Tulis / Pelajaran		Rp 800
6	Emberan		Rp 1,500
7	Kabin		Rp 2,500
8	Kaleng Besi		Rp 1,000
9	Kardus Bersih		Rp 600
10	Karpet Talang / Karpet Plastik		Rp 300
11	Kertas HVS / SWL / Koran		Rp 800
12	Majalah		Rp 300
13	Plastik Gula		Rp 600
14	Seng / Kawat		Rp 600
15	Tembaga		Rp 55,000
16	VCD / Kristal		Rp 3,000
17	Aluminium Panci		Rp 1,100

Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi dan harga pasar

Sedangkan mekanisme program Taling adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan sampah daur ulang di sekolah

- Siswa-siswi membawa barang bekas yang dapat didaur ulang yang sudah dipilah dari rumah masing-masing dan dicuci bersih serta dimasukkan dalam kantong-kantong plastik dengan diberi tanda nomor rekening dan dilekatkan pada kantong plastik tersebut. Tidak ada batasan dalam membawa material asalkan sesuai dengan tabel material daur ulang yang dapat ditukar.



Siswa-siswa yang sedang mengumpulkan sampah terpilah

- Barang bekas daur ulang tersebut dibawa ke sekolah pada hari yang telah ditentukan oleh pihak sekolah masing-masing dengan pihak pengepul.



- c. Sampah daur ulang tersebut diletakkan di tempat yang telah ditentukan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran, penimbangan dan pengisian nilai pembelian. Dalam proses pengukuran, penimbangan dan pengisian nilai pembelian, para siswa dilarang untuk menunggu karena akan mengganggu proses belajar-mengajar.



Pojok atau tempat pengumpulan sampah

- d. Setiap siswa akan menerima satu buku Taling. Kemudian pendistribusian buku rekening Taling ke sekolah-sekolah pilot project, yaitu SDN 018, SDN 024, SDN 006, SMPN 1 dan SMPN 09, secara serentak pada tanggal 16 April 2012 sekaligus sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program Taling. Pendistribusian buku rekening sempat mengalami keterlambatan dikarenakan masih adanya kendala teknis di lapangan dan penyempurnaan buku Taling. Saat ini telah tersedia kurang lebih 18.000 buku Taling dengan 6.000 telah terdistribusi pada saat buku tersebut telah dicetak.



Buku Tabungan Lingkungan (Taling)

2. *Pengukuran, penimbangan dan pengisian nilai pembelian oleh petugas program Taling*

Selanjutnya petugas program Taling dari pihak pengepul maupun unsur DKPP akan melakukan pengukuran dan penimbangan yang hasilnya akan



diisikan nilai pembelian di dalam buku Taling siswa berdasarkan jumlah material daur ulang yang dibawa.

3. *Pengambilan sampah daur ulang oleh pengepul*

Dalam hari yang sama, pengepul atau petugas DKPP akan mengambil material daur ulang tersebut untuk diangkut ke tempat pengumpulan barang bekas milik pengepul, sehingga pojok sampah yang disediakan oleh pihak sekolah sebagai tempat penampungan sementara akan menjadi bersih kembali. Hal ini dilakukan agar tidak ada sampah yang menginap di sekolah. Sistem penyerahan uang kepada siswa sebelum tahun 2014 adalah tiga bulan sekali.



Tempat pengumpulan sampah yang diupayakan selalu segera diambil pengepul

Namun pelaksanaan program ini berjalan bukan tanpa kendala. Dukungan komitmen dari para pemangku kebijakan menjadi kendala utama. Pihak sekolah telah mendukung program tersebut dengan menggerakkan para siswa membawa material daur ulang, menyediakan pojok sampah, dan menunjuk salah satu guru sebagai penanggung jawab kegiatan, akan tetapi dikarenakan tidak adanya mobil pengangkutan, maka terkadang material daur ulang menumpuk di sekolah berhari-hari. Barulah di tahun 2014, DKPP menyediakan satu mobil pengangkut khusus Taling.

Hasil yang Dicapai

Hasil yang diperoleh dari program tersebut adalah:

1. Berubahnya cara pandang yang memengaruhi perubahan perilaku para siswa dalam memandang sampah, dari sesuatu yang tidak berguna menjadi menghasilkan sesuatu.
2. Pada tahun 2012 terdapat 7 (tujuh) sekolah yang melaksanakan program tersebut, yaitu SDN 018, SDN 024, SDN 006, SMPN 1, SMPN 9, SMKN 1 dan SMAN 1, dan di tahun 2013 bertambah menjadi 20 (dua puluh) sekolah dengan penambahan 13 sekolah, yaitu: SMPN 5, MAN, SDN Utama 1, SMPN 4, SDN 009, SMPN 3, SMA Hang Buah, SDN Utama 2, SDN 013, SDIT Ulul Albab, SDN 041, SDS Yaditra, dan SMPN 10.
3. Program ini pun telah ikut menyumbang mereduksi sampah non organik sebesar 4.045 ton di tahun 2012 dan di tahun 2013 telah mereduksi sebesar 16.722 ton.



Pemanfaatan sampah menjadi barang yang dapat memiliki nilai jual



Proses pembuatan kompos dari sampah organik

4. Sedangkan untuk sampah organik dijadikan kompos oleh 8 (delapan) Depo. Depo-depo ini telah ikut membantu mereduksi sampah organik di TPA. Sampai bulan Desember 2013 saja sudah berhasil mereduksi sebesar 11.600 kg.

Program ini telah ikut membantu Pemerintah Kota Tarakan memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata sampai penghargaan Taman Kota Terbaik ke-3 kategori kota sedang. Selain itu, memperoleh penghargaan *best practice* pelaksanaan program Taling yang dianugerahkan oleh DELGOSEA (*Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia*) pada bulan Agustus 2012 di Bangkok, Thailand.



Penghargaan DELGOSEA untuk Kota Tarakan atas Proses Replikasi Program Eco Saver dari Kota Marikina, Filipina dalam Program Taling



Keberlanjutan

Berdasarkan amanat UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, baru-baru ini telah disahkan pula Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tarakan. Selanjutnya Wali Kota yang baru, menjabat belum beberapa bulan ini sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak swasta, seperti Pelindo, Medco, Danamon, Pertamina untuk mendukung program-program pemerintah kota, diantaranya program pengelolaan sampah. Dalam pertemuan awal dengan pihak swasta didapatkan kesepakatan untuk membantu berupa pot-pot bunga dari Danamon, kendaraan motor 3 roda dan mesin pencacah dari Pertamina.

Di awal tahun 2014 terdapat satu mobil khusus pengangkutan Taling yang disediakan oleh DKPP dengan mekanisme kerja pengangkutan sebagai berikut :

1. Sekolah melakukan kegiatan Taling pada hari yang telah disepakati bersama.
2. Petugas DKPP melakukan pengangkutan pada hari yang sama atau beberapa hari sesudahnya dengan syarat Taling disimpan di tempat yang kering dan aman.
3. Petugas mengantarkan Taling ke pengepul.
4. Kurang lebih dua hari kemudian petugas mengambil nota dan uang dari pengepul (1 sekolah mendapatkan satu nota berisi volume, harga, serta total yang didapat).
5. Petugas mengantarkan tanda terima beserta nota dan uang Taling ke sekolah.
6. Sekolah yang melakukan pengelolaan uang tersebut.

Pemerintah Kota Tarakan melalui DKPP berencana mengembangkan program ini tidak hanya ke sekolah-sekolah saja, melainkan ke lingkungan masyarakat. DKPP mulai sekarang tidak bersedia memenuhi permintaan dari masyarakat berkenaan dengan penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), melainkan DKPP bersedia memenuhi permintaan depo-depo di lingkungan masyarakat.



Pengembangan Bank Sampah Diluar Sekolah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat



Pelajaran yang Dapat Diambil

Bonus demografi bagi suatu kota akan memberikan “bonus-bonus” yang lain juga baik positif maupun negatif. Penimbunan sampah yang dihasilkan oleh mereka merupakan salah satu bonus yang negatif, jika tidak dikelola secara baik dan benar. Oleh karenanya, permasalahan sampah perlu segera diantisipasi dengan pengelolaan yang benar agar nantinya tidak menimbulkan bencana. Pemerintah Kota Tarakan telah melahirkan program Taling sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Namun program ini menuntut semua pihak, baik eksekutif, legislatif dan seluruh stakeholders untuk berkomitmen kuat dalam melaksanakan dan mengembangkannya. Karena tanpa adanya komitmen dimaksud, maka berapa pun program yang dilahirkan untuk mengatasi berbagai masalah, maka akan memberikan dampak yang kurang sesuai dari yang diharapkan.

Kemampuan Tular

Bagi pemerintah daerah lain yang akan mencontoh program ini, maka pra kondisi yang diperlukan adalah :

1. Komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah di daerahnya. karena agar program Taling tidak hanya berhenti di tingkat sekolah.
2. Melakukan sinergitas dengan semua pihak.
3. Memasukkan pengetahuan manfaat sampah ke dalam kurikulum pengajaran di sekolah.
4. Memiliki pengetahuan mengenai sampah, baik jenis, pemilahan, packing dan pemasarannya.
5. Memiliki peralatan pendukung program, seperti alat timbang, kendaraan angkut dan lain sebagainya.
6. Mengetahui manajemeninya, seperti bagaimana pemberdayaannya, sistem menabungnya, administrsinya, peminjamannya, pembentukan kelompoknya sampai daftar harga barangnya.
7. Melakukan lobi secara terus-menerus, baik ke DPRD dan pihak-pihak terkait.

Kontak

1. **Drs. Alek Sandra, HM, M.Si**

Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP)
Kota Tarakan
Jl. Halmahera, Tarakan
Telp : (0551) 34940

2. **Abdul Muin**

Kepala Seksi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP)
Kota Tarakan
Jl. Halmahera, Tarakan
HP: 081253219606



3. Arinda Yuniarsih, ST

Staf Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP)
Kota Tarakan
Jl. Halmahera, Tarakan
HP: 082157094708

4. Imam Yulianto

Manajer Humas dan Kerjasama APEKSI
Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960
Telp. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733
Email: imam@apeksi.or.id



Situasi Sebelum Inisiatif

Sebelum adanya program Kota Layak Anak (KLA), seperti kasus urbanisasi di kota-kota pada umumnya, di Kota Surakarta banyak dijumpai seperti anak belum merasa aman dan tenang di rumah, belajar, bermain, dan berekreasi, kurangnya ruang public untuk bermain anak, fasilitas yang aman bagi untuk ke sekolah, anak putus sekolah, anak dengan gizi kurang, anak jalanan yang tidak sekolah dan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak. Kondisi demikian disebabkan oleh berbagai hal, antara lain pemahaman warga masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak masih belum memadai serta tekanan hidup yang semakin berat sehingga mengancam kelangsungan pendidikan, kesehatan, masa depan bahkan jiwa mereka. Selain itu, masih kurangnya kebijakan, program dan kegiatan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Inisiatif

Telah lama Pemerintah Kota Surakarta memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan yaitu anak-anak. Dimulai sejak tahun 2003, Kota Surakarta telah melaksanakan Gerakan Jam Wajib Belajar bagi anak-anak. Komitmen Kota Surakarta ini cukup mendapat perhatian dan bersambut dengan program pemerintah yaitu Kota Layak Anak (KLA), sehingga pada tahun 2006 Kota Surakarta ditunjuk menjadi salah satu kota pilot project pengembangan KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kerjasama dengan UNICEF.

Program pengembangan KLA, yaitu strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Adapun cakupan kegiatannya adalah kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan partisipasi anak.

Strategi yang Diterapkan

Setelah mendapatkan penunjukkan sebagai kota percontohan dari Kementerian PPPA, Pemerintah Kota Surakarta melakukan persiapan dengan membuat *database*, identifikasi masalah dan merumuskan tiga periodisasi pengembangan KLA yang terdiri dari:

1. Program tahun 2006 - 2007: tahap perencanaan model pengembangan KLA;
2. Program tahun 2008 - 2015: tahap pelaksanaan pengembangan KLA, kecamatan layak anak dan kelurahan layak anak;
3. Tahun 2015 diharapkan Kota Surakarta menjadi KLA.

Selanjutnya dalam melaksanakan program tersebut Pemerintah Kota Surakarta menyusun visi dan misi KLA.

Visi KLA Kota Surakarta adalah:

Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota yang Layak untuk Anak di tahun 2016, melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi serta cinta tanah air”.



Sedangkan misinya adalah:

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup sehat.
2. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini.
3. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsive terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.
4. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.
5. Menyediakan pelayanan perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Dalam menjalankan program tersebut, terdapat empat langkah besar tahapan KLA, yaitu:

1. Membangun komitmen dan pembentukan tim pelaksana pengembangan KLA;
2. Pengumpulan data dasar;
3. Identifikasi kegiatan dan permasalahan anak melalui SKPD, lembaga dan organisasi terkait;
4. Rencana aksi kota pengembangan KLA.

Kelembagaan

Untuk mewujudkan KLA, diperlukan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak. Kerja sama tersebut diperkuat dalam bentuk Tim Pelaksana Pengembangan KLA yang dituangkan dalam SK Wali Kota Surakarta No.130.05/08/1/2008 tentang Tim Pelaksana Pengembangan KLA yang anggotanya terdiri dari 50 institusi/lembaga.

Pemerintah kota menggunakan istilah gugus tugas dalam bentuk tim yang dibagi menjadi empat kelompok kerja, yaitu :

1. Kelompok kerja bidang kesehatan, sebagai koordinator adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
2. Kelompok kerja bidang pendidikan, sebagai koordinator adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta.
3. Kelompok kerja bidang perlindungan anak, sebagai koordinator adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.
4. Kelompok kerja bidang partisipasi anak, sebagai koordinator adalah Komisi Independen Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta (KIPPAS) dan Forum Anak Surakarta (FAS).

Dengan demikian, meski alokasi anggaran responsif anak pada Bapermas PPPA dan KB selalu ada setiap tahunnya, tetapi oleh karena Wali Kota Surakarta telah membentuk gugus tugas, maka anggaran yang responsif anak juga ada di setiap SKPD yang terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Infokom, Dinas Perhubungan, Dinas Pasar, Dinas Pariwisata dan Seni Budaya, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).



Selanjutnya guna memperkuat kerjasama tersebut, maka telah ditandatangani pula kesepakatan bersama MoU No.463/108 tentang Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana pada tanggal 30 Desember 2008. Tugas dari Tim Pelaksana Pengembangan KLA adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi stakeholders yang membidangi anak sesuai dengan indikator yang disusun.
2. Mengadakan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan stakeholders yang terdiri dari pemerintah kota, DPRD, ormas, ornop, perguruan tinggi, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan anak-anak, yang membidangi anak untuk menyamakan komitmen dalam melaksanakan pengembangan KLA. Menyusun mekanisme kerja.
3. Mensosialisasikan konsep KLA.
4. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya termasuk menyusun indicator sebagai ukuran capaian dari KLA ini sebanyak 31 indikator.
5. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan yang terkait dalam pengembangan KLA.
6. Mengadakan advokasi dan sosialisasi tentang kebijakan pengembangan model KLA, sehingga terwujud komitmen dari wali kota, wakil wali kota dan DPRD serta komitmen dari pimpinan stakeholders, untuk aktif menyuarakan hak-hak anak serta mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dalam KLA.
7. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik.

Pendekatan pengembangan KLA dilaksanakan sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan keluarga. Dalam rangka memperkuat kerjasama di tingkat kecamatan dan kelurahan, dibentuklah Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang mengacu pada tim tingkat kota. Selain itu, pemerintah kota pun memberikan dana stimulan sebesar Rp 2 juta/tahun bagi masing-masing kelurahan dan kecamatan. Tim membentuk kader-kader di setiap kelurahan.

Di tingkat kelurahan selain ditunjuk Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan juga ditunjuk fasilitator yang tugasnya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Fasilitator ini ditunjuk baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Satgas di tingkat kelurahan memiliki fungsi salah satunya mengontrol Gerakan Jam Wajib Balajar (GJWB).

Data Dasar

Data dasar yaitu data tentang situasi anak secara umum berdasarkan indikator KLA yang telah disusun oleh Kementerian PPPA, merupakan pedoman untuk menyusun dan melakukan program kegiatan KLA disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Surakarta. Indikator tersebut adalah:

- Program hidup sehat.
- Pemberian pendidikan berkualitas.
- Perlindungan terhadap anak dari kekerasan, penganiayaan, perdagangan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
- Perlindungan umum (pelayanan akta, penegakan hukum, penerapan restorative justice, dan adopsi).
- Peningkatan ekonomi dan penghapusan penggunaan tenaga kerja anak.
- Partisipasi anak.



- Lain-lain (renstra, RPJM, Perda, dokumen, KIE).

Pengumpulan data dasar dimaksudkan untuk mengetahui kondisi obyektif awal dan sebagai dasar pertimbangan perencanaan dan pengembangan KLA.

Identifikasi Permasalahan Anak dan Kegiatan

Identifikasi permasalahan anak dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana SKPD, lembaga dan organisasi terkait telah melakukan program-program anak yaitu melalui *focus group discussion* (FGD) pemetaan anak, selain itu juga berpedoman pada data dasar. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya diolah dan dianalisa oleh tim yang dituangkan ke dalam 4 (empat) kegiatan yaitu :

- Kegiatan yang sudah dilaksanakan
- Kegiatan yang akan dilaksanakan
- Kegiatan yang direncanakan
- Kegiatan unggulan KLA

Identifikasi dilakukan berdasarkan pada indikator yang telah ditentukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan pada Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, bahwa hasil identifikasi dituangkan ke dalam 4 (empat) bidang besar, yakni:

1. Bidang kesehatan;
2. Bidang pendidikan;
3. Bidang perlindungan;
4. Bidang partisipasi anak.

Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan anak termasuk indikator yang dibangun, kemudian disusun program KLA Kota Surakarta dalam bentuk Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA (RAK-PKLA) Kota Surakarta tahun 2008-2015 dengan SK Wali Kota Surakarta No. 054/08-E/1/2009.

RAK-PKLA terdiri dari 5 (lima) kluster, yaitu :

1. Kluster 1: Hak sipil dan kebebasan ke dalam bentuk
 - a. Program kepemilikan akte kelahiran gratis. Pelayanan dapat melalui rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin maupun posyandu melalui TP PKK kelurahan dengan cara jemput bola maupun kolektif.
 - b. Kartu Insentif Anak (KIA) adalah kartu *discount* dari 5%-70% untuk anak-anak berbelanja di beberapa toko buku, sarana olah raga di perhotelan, sarana hiburan anak, rumah sakit, supermarket, bis sekolah, toko batik dan lain sebagainya. Kartu ini diterbitkan oleh Dispendukcapil untuk semua anak di Kota Surakarta usia 0-18 tahun dan diterbitkan secara gratis.



Kartu Insentif Anak (KIA)



c. Partisipasi anak dalam proses pembangunan melalui Forum Anak Surakarta (FAS). Pemkot juga menyusun mekanisme partisipasi anak dalam musrebangkel, musrenbangcam dan musrenbangkot serta partisipasi aktif anak dalam musrebangkel, musrenbangcam dan musrenbangkot.



Forum Anak Surakarta (FAS)

2. Kluster 2: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Menyediakan tempat konsultasi anak dan keluarga dalam bentuk Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Posyandu, dan PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Solo) di setiap kelurahan.



Program Bina Keluarga

3. Kluster 3: Kesehatan dasar dan kesejahteraan Pemerintah kota memberikan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) yang merupakan jaminan kesehatan secara gratis untuk keluarga miskin. Selain itu, disediakan pula rumah sakit ramah anak yang berlokasi di RSUD Dr. Moewardi dan RSU PKU Muhammadiyah Surakarta. Kemudian, dikembangkan juga puskesmas ramah anak, ruang laktasi di sejumlah fasilitas public seperti terminal bis, posyandu terintegrasi, dimana kegiatan posyandu yang diintegrasikan bersama kegiatan BKB, PAUD, membentuk Kelompok Pendukung Ibu serta Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Ramah anak dalam arti menyediakan fasilitas bermain bagi anak-anak.

KARTU PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) KOTA SURAKARTA		PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH PESERTA : SILVER
 No. PKMS : 04.10.03.029888 Nama : ASTIKA ASHA RAINI Tgl lahir : 23-07-2000 Alamat : NGGRESAN JETRES RT/RW 002/017 Pekerjaan : - No. KK : 3372040301917 Puskesmas : Ngresan Masa berlaku : 27-02-2009 Surakarta, 27-02-2008 Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta	*Kartu PKMS harus dibawa setiap kali berobat *Peserta PKMS menggunakan buku Medical Record untuk kepentingan verifikasi Bila mendapat kesulitan hubungi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Telp 0271-632202	1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan primernya; 2. Pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap; 3. Pelayanan perawatan di Puskesmas rawat inap dan FSD Kota Surakarta; 4. Pelayanan gawat darurat di Puskesmas rawat inap; 5. Pelayanan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Surakarta; 6. Pelayanan tingkat lanjutan untuk perawatan di Rumah Sakit Pemerintah Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota, dengan fasilitas ruang perawatan kelas III dan kelas maksimal pembayaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 7. Pelayanan obat yang masuk Formulasi.
	1. Cuci darah, 2. Kimioterapi, 3. Operasi besar 4. Kaca mata, 5. Infus oculer lens, 6. Bantrol, alat dan tindakan yang berkaitan untuk kosmetik; 7. General check up; 8. Peserta pindah kelas perawatan; 9. Pelayanan yang tidak mengikut prosedur/ketentuan	

PKMS untuk Anak-Anak (Silver)



KARTU PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) KOTA SURAKARTA		PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH PESERTA : GOLD										
 <p>No PKMS : 03.02.02.014101 Nama : WINARNI Tgl. lahir : 25-11-1974 Alamat : Semanggi RT 003 RW 022 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta Pekerjaan : No. KK : 3372031410040058 Puskesmas : Sangkrang Masa berlaku : 31-01-2009 Surakarta, 31-01-2008 Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta</p> <p>GOLD</p> <p>dr. SITI WIAHYUNINGSIH, M.Kes Tanda Tangan/Cap Jenpol Peserta</p>	<p>1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dari jaringannya; 2. Pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap; 3. Pelayanan persalinan di Puskesmas rawat inap dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Surakarta; 4. Pelayanan gawat darurat di Puskesmas rawat inap; 5. Pelayanan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Surakarta; 6. Pelayanan tingkat lanjutan untuk perawatan di Rumah Saku Pemerintah/ Swasta yang dibantu oleh Pemerintah Kota, dengan fasilitas ruang perawatan kelas III; 7. Pelayanan obat yang masuk Formularium</p>											
	<p>PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Kaca mata;</td> <td>6. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;</td> </tr> <tr> <td>2. Intra ocular lens;</td> <td>7. General check up;</td> </tr> <tr> <td>3. Alat bantu dengar;</td> <td>8. Peserta pindah kelas perawatan;</td> </tr> <tr> <td>4. Alat bantu gerak;</td> <td>9. Pelayanan yang tidak mengikuti prosedur/kelengkapan;</td> </tr> <tr> <td>5. Pelayanan penunjang diagnostik canggih;</td> <td></td> </tr> </table>		1. Kaca mata;	6. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;	2. Intra ocular lens;	7. General check up;	3. Alat bantu dengar;	8. Peserta pindah kelas perawatan;	4. Alat bantu gerak;	9. Pelayanan yang tidak mengikuti prosedur/kelengkapan;	5. Pelayanan penunjang diagnostik canggih;	
	1. Kaca mata;	6. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;										
	2. Intra ocular lens;	7. General check up;										
	3. Alat bantu dengar;	8. Peserta pindah kelas perawatan;										
	4. Alat bantu gerak;	9. Pelayanan yang tidak mengikuti prosedur/kelengkapan;										
	5. Pelayanan penunjang diagnostik canggih;											
	<p>* Kartu PKMS harus dibawa setiap kali berobat * Peserta PKMS mengajukan untuk dibuka Medical Record untuk kepentingan verifikasi</p>											
	<p>Bila mendapat kesulitan hubungi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Telp.0271-632202</p>											

PKMS untuk Anak-Anak (Gold)

4. Kluster 4: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
 - a. Kegiatan yang dikembangkan antara lain:
 - a. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang diluncurkan bulan April 2010. Bantuan diberikan untuk semua siswa SD dan SMP, sedangkan untuk siswa SMA diberikan stimulan. BPMKS ini merupakan dana pendukung dari Dana Bos bila belum mencukupi. Tim dari Disdikpora yang menentukan kriteria dari penerima BPMKS ini.
 - b. Sekolah plus yang mengakomodasi siswa dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di Kota Surakarta dengan dibebaskan dari seluruh biaya.
 - c. Program Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) dimana anak-anak dihimbau untuk belajar antara jam 18.30-20.30 WIB dengan cara anak-anak tidak boleh berkeliaran, TV harus dimatikan, dan orang tua/keluarga harus mendampingi mereka. Di setiap RW dibentuk satgas GWJB untuk memantau program tersebut. Program ini dimulai dengan tanda sirene yang diperdengarkan melalui pengeras suara mesjid atau kentongan di pos siskamling.



Informasi Gerakan Wajib Jam Belajar di salah satu kelurahan



- d. Sekolah ramah anak, bantuan rambu dan sosialisasi zona selamat sekolah (ZOSS), pemberian helm bagi anak sekolah, *Solo Car Free Day*, taman cerdas, taman main, dan panggung kreasi anak.
- e. Perpustakaan keliling dan mobil pintar sebanyak 2 unit, menyediakan berbagai buku bacaan maupun alat peraga tentang ilmu pengetahuan bagi anak-anak secara gratis.



Perpustakaan Keliling

5. Kluster 5: Perlindungan khusus

Dengan program penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyusun SOP penanganan korban kekerasan anak di tingkat kelurahan. Selain itu, terdapat penanganan anak jalan, anak dengan bantuan hukum (ABH), HIV Aids, napza dan narkoba, anak terlantar, difabel, anak autis, pekerjaan terburuk anak. Untuk penanggulangan ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) pemkot menyediakan rumah rehabilitasi Graha Yoga Pertiwi. Pemkot juga membangun Klinik Center (Rumah Perlindungan Sosial Anak) di LSK Bina Bakat dimana diberikan ketrampilan seperti jahit, bengkel, montir, stir mobil, dll. Demikian juga dengan Sekolah Kita (PPAP Seroja) dan KLK (kelas layanan khusus) untuk anak jalanan (20% formal, 80% ketrampilan).



Rumah Rehabilitasi Graha Yoga Pertiwi



Kegiatan di LSK Bina Bakat



Sekolah untuk Anak Jalanan

Kegiatan-kegiatan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan layak anak sendiri antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan komitmen dari camat dan lurah dalam pengembangan kecamatan dan kelurahan layak anak dengan membentuk tim/pokja untuk melaksanakan program kecamatan/kelurahan layak anak dan membuat laporan kegiatan;
- Sosialisasi pengembangan KLA ke tingkat kecamatan dan kelurahan yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat;
- Pelatihan pendekatan partisipatif (*PRA/participatory rural appraisal*), yaitu pelatihan yang mengajak masyarakat untuk merencanakan sendiri berdasarkan masalah yang ditemukan sendiri di lingkungannya. Dalam kegiatan ini juga dipilih fasilitator dan juga Tim Pelaksana Pengembangan KLA tingkat kecamatan dan kelurahan. Setiap kelurahan dapat mengadakan kegiatan pelatihan ini lebih dari satu kali dalam setahun, tergantung kebutuhan masing-masing.
- Musyawarah untuk masyarakat, merupakan kegiatan tindak lanjut dari pelatihan partisipatif. Dalam musyawarah masyarakat dilakukan pembahasan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Menentukan permasalahan anak di masyarakat kelurahan;
 - 2) Menentukan potensi kelurahan yang ada terkait dengan anak;
 - 3) Menentukan kebutuhan anak;
 - 4) Menentukan pemecahan masalah anak dan peringkatnya;
 - 5) Menentukan penanggungjawab kegiatan;



Proses koordinasi dan sosialisasi oleh Walikota Surakarta langsung



6) Menentukan waktu pelaksanaan.

- Pendataan anak tingkat kelurahan, termasuk pendataan permasalahan anak yang telah ditentukan dalam musyawarah masyarakat.
- Menyusun program kerja Tim KLA tingkat kota bersama dengan tim KLA kecamatan dan kelurahan.
- Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan program yang disusun bersama tim kota, kecamatan dan kelurahan. Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh SKPD, LSM, ormas baik tingkat kota, kecamatan maupun tingkat kelurahan dan masyarakat.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Skema anggaran KLA Kota Surakarta

Berikut Profil Anggaran Untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak tahun 2012 - 2013

Keuangan	SKPD & Lembaga Terkait	JUMLAH ANGGARAN (Rp)		
		2012	2013	Keterangan
1 Penguatan kelembagaan (pelatihan KHA bagi aparat dan pedamping, kampanye, sosialisasi, dll).	BAPERMAS PP PA & KB	300.000.000	434.496.000 138.400.000	KLA Unicef (ABH)
	BAPPEDA	105.000.000	105.000.000 349.710.000	KPPHIA dan KLA Unicef
2 Hak Sipil dan Kebebasan (pemenuhan Akta Kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitas kelompok anak, fasilitas kegiatan partisipasi anak, dll)	Bapermas,PP,PA dan KB	189.000.000	250.000.000	Profil Anak dan Kegiatan Fas
	DISPENDUK & CAPIL	250.000.000	300.000.000	Pemenuhan akte kelahiran
	Dinas Pariwisata Seni dan Budaya	1.815.000.000		Fasilitasi Kelompok Anak
	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	185.725.000	605.050.000	Kegiatan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Kampung
3 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (pembinaan Keluarga Balita dan Remaja, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas & tenaga konsultasi, penyediaan dan pemeliharaan LKSA / Panti, dll).	Dinsonakertrans	172.880.000	175.000.000	Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
4 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Gizi, Imunisasi, Penanggulangan penyakit, dll)	Dinas Kesehatan	699.930.000	800.000.000	PMTAS Posyandu PKMS
		1.188.000.000 21 M	1.600.000.000 22 M	



5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar 12 Tahun, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi	Dinas Pendidikan dan Olah raga	23 M	32 M	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Sekolah Inklusi
		Dinas Pendidikan dan Olah raga	-	150.000.000	
		Dinas Pariwisata Seni dan Budaya			
		Bapermas ,PP,PA dan KB Kota Surakarta	10.000.000 25.000.000 50.000.000	- - -	Operasional FAS Hibah FAS Forum Anak Kel Jebres Forum Anak Kec Jebres
6	Perlindungan Khusus (Pelayanan, pengadaan, Pemeliharaan Fasilitas perlindungan anak, Dll).	Dinsosnakertrans	50.000.000	50.000.000	Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi korban Eksploitasi perdagangan Anak
		PTPAS (Bapermas ,PP,PA dan KB)	25.000.000	290.000.000	Pendampingan dan Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di 10 Kelurahan

Hasil yang Dicapai

Dalam tiga periodisasi tersebut di atas, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- Tersusun data KLA Kota Surakarta tahun 2006 dengan berpedoman pada indikator pengembangan model KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Melalui proses identifikasi permasalahan anak tersusunnya Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA (RAK-PKLA) Kota Surakarta tahun 2008-2015.
- Ditandatangani SK Wali Kota Surakarta No.130.05/08/1/2008 tentang Tim Pelaksana Pengembangan KLA serta MoU No.463/108 tentang Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana dan Pertemuan pleno Tim Pelaksana Pengembangan KLA setiap tiga bulan sekali.
- Lahirnya Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pengembangan kota layak anak di Kota Surakarta.
- Dengan teridentifikasinya stakeholders di Kota Surakarta yang membidangi anak maka telah terlibat dalam proses sosialisasi kebijakan pengembangan model KLA kepada seluruh kalangan masyarakat.
- Dalam bidang pendidikan tercapainya:
 - a. Terbangunnya Gerakan Wajib Jam Belajar yang dilaksanakan di 51 kelurahan
 - b. Sekolah Ramah Anak 25 %
 - c. Terdapat 9 (Sembilan) SDN Plus, dua SMPN Plus dan satu SMKN yang memberikan bantuan dana baik bentuk beasiswa di luar dana Bos yang



diperoleh dari pemerintah (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta, BPMKS)

a. Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Di 171 sekolah



Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

b. Terbangunnya 7 (tujuh) Taman Cerdas, yaitu Taman Cerdas Kelurahan Sumber, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Joyotakan, Taman Cerdas Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Gandean, Kelurahan Pajang dan Kelurahan Jebres. Taman Cerdas sebagai tempat bermain, tempat mengembangkan kreasi seni, tempat membaca dan tempat berlatih komputer.



Taman Cerdas

- 18 Perpustakaan Kampung
- 9 Sanggar belajar, 17 Sanggar Seni
- 6 Taman Bermain Anak, taman-taman kota yang berada di pusat-pusat keramaian kota yang membuat kesan Kota Surakarta, selain asri juga ramah terhadap publik khususnya anak-anak berupa fasilitas bermain untuk anak-anak. Taman-taman tersebut adalah Taman Monumen Banjarsari, Taman Balekambang, Taman Terminal Tirtonadi, Taman Sekar Taji.
- Dalam bidang kesehatan tercapainya:
 - a. 5 Puskesmas Ramah Anak yang mampu meningkatkan prosentase penerima imunisasi dasar lengkap
 - b. 5 Posyandu Terintegrasi
 - c. 67 Pojok ASI (ruang laktasi) di sejumlah fasilitas publik seperti Terminal Tirtonadi yang diluncurkan pada saat Konferensi Asia Pacific KLA tanggal 30 Juni – 02 Juli 2011
 - d. 17 Rumah Sakit Ramah Anak (negeri maupun Swasta)



- e. Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) di 51 Kelurahan
- f. Turunnya angka kematian bayi
- g. Bertambahnya jumlah penerima ASI eksklusif
- h. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dengan anggaran 1,6 M
- i. Menurunnya kekurangan gizi pada balita
- Dalam bidang perlindungan
 - a. Dibangunnya tempat rehabilitasi Graha Yoga Pertiwi, yaitu sebagai tempat untuk merehabilitasi korban kekerasan, korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dan lain-lain.
 - b. Terbentuknya tempat pelayanan terpadu untuk anak “Bina Anak Indonesia”
 - c. Pengembangan jaringan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) dalam deteksi dini, penanganan kasus dan pencegahan berbasis masyarakat dikembangkan dengan rintisan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap kelurahan
- Dalam bidang hak sipil anak dan partisipasi tercapainya:
 - a. 94% anak di Kota Surakarta telah memiliki akte kelahiran.
 - b. Hingga tahun 2011, telah ada 43 mitra usaha yang memberikan potongan harga dengan KIA.
 - c. Terbentuknya Forum Anak Surakarta (FAS) yang diluncurkan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan pada peringatan Hari Anak Nasional di Kota Surakarta tanggal 19 Juli 2007 di 51 kelurahan.
 - d. Terbentuknya Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang sampai saat ini telah terbentuk seluruh kecamatan dan kelurahan, kemudian juga terlaksananya program kecamatan dan kelurahan layak anak seperti pendataan data anak, sosialisasi, pelatihan, musyawarah untuk mufakat, terbentuknya kader-kader lebih kurang 25 orang/kelurahan dan sebagainya.
 - e. Terlaksananya kegiatan Jambore Dolanan Anak, Jambore Anak, Jambore Umat Beragama, Peringatan Hari Anak dengan berbagai lomba anak
 - f. Terlaksananya *car free day* setiap hari minggu jam 05.00-09.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Diponegoro dalam upaya memberikan ruang lebih sehat kepada anak-anak bersama keluarga.
- Diperolehnya sejumlah penghargaan pengembangan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pada tahun 2009 meraih penghargaan sebagai pelaksana terbaik, tahun 2011 meraih penghargaan kategori madya dan tahun 2012 meraih penghargaan kategori Nindya.

Keberlanjutan

Program ini mendapatkan sambutan dan penerimaan yang baik dari masyarakat. Pada tingkat masyarakat kelurahan, setelah kegiatan sosialisasi KLA oleh Tim Pelaksana KLA tingkat kota, tokoh masyarakat, LPMK dan SKPD, kelurahan menindaklanjuti dengan kegiatan dan program yang responsif anak dengan tujuan terciptanya Kelurahan Layak Anak. Kondisi yang umum terjadi adalah adanya efek berantai yang terjadi bila terdapat kegiatan yang sangat menarik terkait masyarakat banyak termasuk anak-anak sehingga program-program di kelurahan terkait



program responsif anak, seperti berbagai lomba, maka akan menular ke keluarah lainnya, sehingga program akan menjamur dengan sendirinya. Sehingga program yang memasyarakat seperti ini tentunya memiliki prospek keberlanjutan sangat tinggi.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen dengan program ini. Hal itu dibuktikan dengan jaminan alokasi anggaran dengan dana berasal dari APBD yang alokasinya di semua SKPD yang masuk dalam Tim Pelaksana Pengembangan KLA. Selain itu, dana CSR dan swadaya masyarakat. Bahkan saat ini, pemerintah kota telah menguatkan program ini dalam payung Perda No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Pelajaran yang Dapat Diambil

Anak-anak adalah generasi potensial emas untuk pembangunan bangsa di masa mendatang, sehingga kualitas generasi masa depan ini tentu menjadi aset berharga yang harus dijaga. Untuk itu menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah dalam memastikan generasi mendatang ini mendapatkan fasilitas yang terbaik dan terpenuhi hak-haknya. Namun pemenuhan kondisi ini sering terabaikan dan faktanya banyak persoalan yang menimpa anak-anak di negeri ini. Sehingga sebuah komitmen kuat dari pemerintah daerah menjadi kebutuhan utama jika ingin masa depan daerahnya dapat terjamin keberlangsungannya. Kota Layak Anak Surakarta dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai capaian, tidak lebih karena komitmen kuat seluruh jajaran para pemangku kebijakan baik dari kepala daerah hingga elemen terendah untuk memajukan kualitas generasi mendatang kota tersebut. Di samping itu pelibatan seluruh stakeholders agar turut menjadi pemilik dan pelaksana program menjadi kunci sukses terlaksananya pengembangan dengan baik. Untuk itu kunci koordinasi antar lembaga serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang harus dijalankan sehingga program kota layak anak ini berjalan dengan baik.

Kemampuan Tular

Persoalan yang terjadi pada anak-anak baik kepastian terjaminnya hak-hak anak-anak sebagai bagian dari masyarakat, maupun kasus-kasus sosial seperti kemiskinan termasuk kasus kriminal seperti kekerasan semakin banyak terjadi di manapun. Untuk itu program yang menjamin terfasilitasinya hak anak-anak sudah selayaknya menjadi program yang harus dijalankan oleh seluruh pemerintah. Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Program kota Layak Anak sebagai upaya menguatkan pemerintah dalam menjalankan perannya dalam menjamin hak untuk anak-anak. Namun belum semua pemerintah daerah telah menjalankan program ini, dan baru beberapa kota yang telah didampingi atau menjadi kota percontohan oleh KPPPA. Namun sesungguhnya tanpa pendampingan, dengan bekal komitmen penguatan kualitas sumber daya manusia ke depan, hal ini tentunya menjadi pelayanan dasar oleh setiap pemerintah daerah.

Pengalaman Kota Surakarta yang telah menunjukkan banyak hasil positif ini tentunya dapat dipelajari oleh daerah lain bagaimana cara mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu juga, bagaimana



Pemerintah Kota Surakarta dapat secara cepat merespon kebijakan pemerintah pusat tentang pemenuhan hak anak.

Untuk itu pra kondisi yang diperlukan dalam penerapan inovasi ini antara lain adanya komitmen dan kesepakatan dari semua pihak pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang responsif terhadap anak.

Karena pengalaman dan capaian yang telah diperoleh Pemerintah Kota Surakarta ini, sudah banyak mendapat kunjungan studi banding dari pemerintah daerah lain dan lembaga-lembaga pemerhati masalah anak. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 43 pemerintah kota/kabupaten mengadakan studi banding ke Kota Surakarta dalam program tersebut.

Kontak

1. **Drs. Anung Indro Susanto, MM**

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat *Pemberdayaan Perempuan* Perlindungan Anak *dan Keluarga Berencana* Kota Surakarta

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta 57111

Telp (0271) 636426, Fax (0271) 636426

Email: anung_indro@yahoo.co.id

2. **Dra. Supraptiningsih, M.Pd., M.Si**

Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta 57111

Telp (0271) 636426, Fax (0271) 636426

Email: praptiningsih78@ymail.com

3. **Siti Dariyatini, S.Sos., MM**

Kepala Sub Bidang Pengembangan Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta 57111

Telp (0271) 636426, Fax (0271) 636426

Email: sitidariyatini@yahoo.com

4. **Imam Yulianto**

Manager Kehumasan dan Kerjasama APEKSI

Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09

Komplek Rasuna Epicentrum

Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960

Telp. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733

Email : imam@apeksi.or.id



GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS) KOTA SURABAYA

Profil Kota



Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya secara geografis terletak antara 0721' Lintang Selatan dan 11236' - 11254' Bujur Timur. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih 3 juta jiwa.

Wilayah Kota Surabaya di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Luas wilayah Kota Surabaya 303.063 Km² yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 154 desa/kelurahan. Sebagai kota metropolitan,

Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang ditemukan

lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, salah satunya adalah PT PAL.

Kawasan industri di Surabaya diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Margomulyo. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang mencakup juga hotel dan restoran, merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi Surabaya yang tergabung dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di sektor pariwisata, Surabaya memiliki objek wisata alam Kebun Binatang Wonokromo dan Pantai Kenjeran. Kota ini juga mempunyai banyak wisata sejarah dari kenangan Soerabaja Tempo Doeloe, gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda dan Jepang salah satunya adalah Hotel Oranje atau Yamato. Disamping dianugerahi wisata sejarah, Surabaya juga kaya akan wisata belanja.

Sebagai kota perdagangan, Surabaya memiliki cukup banyak pusat perbelanjaan dan mal. Kesenian tradisional di Kota Surabaya tumbuh dan berusaha untuk tetap dilestarikan. Bentuk kesenian tradisional kota ini banyak ragamnya. Ada seni tari, seni musik dan seni panggung, antara lain: Ludruk, Gending Jula Juli Suroboyo, Tari Remo, Kentrung, Okol, Seni Ujung, Besutan, upacara Loro Pangkon, tari Lenggang Suroboyo dan Tari Hadrah.



Kota Surabaya meliputi 31 Kecamatan, yaitu:

- Surabaya Pusat: Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan
- Surabaya Timur: Gubeng, Gununganyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggilis, Mejoyo
- Surabaya Barat: Benowo, Pakal, Asemrowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri
- Surabaya Utara: Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean, Cantikan, Krembangan
- Surabaya Selatan: Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karangpilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh, Pakis, Sawahan

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah Kota Surabaya mulai menerapkan *Government Resources Management System (GRMS)* atau Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintahan sejak 2004. Saat itu diproyeksikan menggantikan tata cara manual dan hasilnya, kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Walikota Surabaya menuturkan, pihaknya bisa hemat dari segi pengeluaran dan pekerjaan juga lebih mudah dan praktis.

GRMS dapat diakses tidak terbatas tempat dan waktu melalui media internet sehingga bisa diakses oleh pengguna dimanapun berada. Sistem telah dibangun dan diterapkan sampai saat ini. Secara berkelanjutan dilaksanakan pengembangan sistem untuk penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan mewujudkan integritas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi hulu sampai dengan hilir (dalam konteks belanja), meliputi proses penyusunan anggaran (*e-Budgeting*), perencanaan pekerjaan (*e-Project*), pelelangan secara elektronik (*e-Procurement*), administrasi kontrak dan pencairan pekerjaan (*e-Delivery*), monitoring pelaksanaan kegiatan (*e-Controlling*), pengukuran kinerja PNS (*e-Performance*), usulan pembangunan (*e-Musrenbang*). Serta terintegrasi dengan aplikasi *e-Payment* dan *e-Simbada* dalam kesatuan *database*.

Situasi Sebelum Inisiatif

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kurang efisien, kurang efektif, kurang akuntabel, tidak transparan, tidak terukur dan rawan korupsi, sehingga pembangunan kota menjadi lebih lambat. Lingkungan yang kumuh, taman kota yang tidak terpelihara, sampah yang tidak tertangani, banyak anak terlantar dan gelandangan di jalanan, banyak anak putus sekolah karena tidak mampu, pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk didalamnya terdapat pembangunan-pembangunan fisik seperti gedung dan jalan tidak maksimal kualitasnya dikarenakan kurang transparansi (peluang untuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih sangat tinggi) sehingga hasilnya kurang memuaskan dan memunculkan paradigma negatif dan menurunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu sudah menjadi rahasia umum jika pegawai Pemerintah Daerah pada waktu tersebut memiliki motivasi bekerja yang kurang bagus karena menganggap



yang bekerja sungguh-sungguh dan yang tidak, *rewardnya* sama saja dan berdampak tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran cukup lama karena dilakukan secara manual, komponen harga satuan sebagai dasar penyusunan anggaran tidak standar.

Rekapitulasi anggaran per rekening belanja beserta pengendalian proses usulan dan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sulit dilakukan, dimana kesesuaian dengan target dan program serta keterlambatan penyusunan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja sulit terpantau. Setelah anggaran disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, untuk pelaksanaannya belum ada aplikasi yang mewadahi jadwal pelaksanaan anggaran per bulan dalam satu tahun anggaran berjalan beserta metode pengadaannya, sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti kapan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, apalagi untuk mengetahui alokasi pemaketan pekerjaan (arus kas masuk dan keluar) per triwulan dalam satu tahun dari seluruh SKPD/Unit Kerja. Data tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatur ketepatan arus kas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Pada waktu itu jika Walikota/Sekretaris Daerah meminta laporan tentang penyerapan anggaran dan progress fisik pekerjaan/pembangunan yang telah dilaksanakan maka yang dimintai laporan tidak bisa menjawab dengan cepat dikarenakan butuh waktu mengumpulkan data-data terkait. Disamping itu, Sebelum munculnya inisiatif, tidak tersedia mekanisme pelibatan aktif masyarakat untuk merumuskan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Inisiatif

Konsep GRMS ini berawal dari pemikiran yang mengacu pada *Enterprise Resource Planning* (ERP) atau Perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem terpadu berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal berwujud termasuk aset, sumber daya keuangan, bahan, dan sumber daya manusia. Ini merupakan arsitektur perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara semua fungsi bisnis dalam batas-batas organisasi dan mengelola hubungan dengan para stakeholder di luar. Dibangun di atas sentralisasi database dan biasanya menggunakan platform komputasi yang umum, sistem ERP mengkonsolidasi semua operasi bisnis menjadi perusahaan seragam dan lingkungan sistem yang luas.

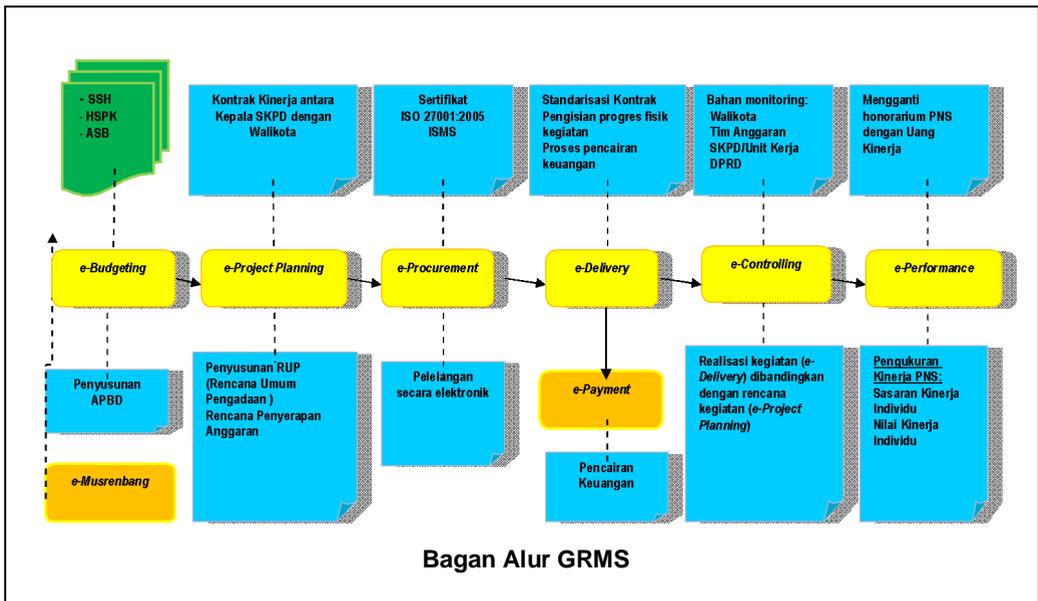
GRMS diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan ITS (Intitut Teknologi Surabaya) dan sudah dipatenkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Ditjen HAKI pada tahun 2007.

BAGAN ALUR PROSES GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)

Secara umum ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan.



Konsep ERP ini banyak dipergunakan oleh pihak swasta atau perusahaan-perusahaan besar, maka Pemerintah Kota Surabaya mengambil inisiatif untuk menerapkan konsep tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada pada lingkup pemerintahan.



Strategi Yang Dijalankan

Tahap-tahap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan program ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perumusan GRMS

Pemerintah Kota Surabaya mengambil inisiatif untuk menerapkan konsep ERP dengan merumuskan GRSM yang didalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang sesuai kebutuhan pada lingkup pemerintahan. Berikut aplikasi-aplikasi dalam GRMS:

e-Procurement yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Sehingga tidak terjadi Kolusi, Korupsi, maupun Nepotisme, dikarenakan proses tender melalui sarana aplikasi internet ini bersifat sangat transparan. Kematangan mekanisme yang sudah dikembangkan dalam e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya diadopsi sebagai mekanisme formal nasional untuk pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender. Modul ini sudah melalui proses sertifikasi dan mendapat sertifikat ISO 9001 dan ISO 27001.



e-Budgeting dalam penyusunan anggaran dengan menyiapkan Standar Harga Satuan Daerah (SHSD) yang distandarisasi secara formal mengacu pada data historis, dan disesuaikan dengan harga pasar minimal 6 (enam) bulan sekali, demikian juga dengan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB) mengacu pada SSH yang sudah disesuaikan. Program kerja, kegiatan dan target *output* kegiatan. Proses penyusunan anggaran tidak membutuhkan waktu yang lama dan pengendalian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mudah dilakukan karena data disajikan secara detail, transparan dan *real time* karena Seluruh top management dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat melihat secara transparan program dan kegiatan berikut alokasi dana anggaran yang telah ditetapkan secara global, dan Kepala SKPD secara detail dapat melihat program dan kegiatan berikut alokasi dana anggaran di lingkungan internal SKPD masing-masing.

e-Project Planning dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yaitu pemaketan pekerjaan dan rencana penyerapan anggaran. Perencanaan pelaksanaan anggaran kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran dan didalamnya terdapat pencatatan rincian rencana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan faktor waktu, alokasi anggaran, volume kegiatan dan juga metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya. Data alokasi penyerapan anggaran digunakan untuk mengatur arus kas masuk dan keluar (*cash flow*) Pemerintah Kota Surabaya, selain itu Kontrak kinerja kepala SKPD dengan Walikota diformalkan mengacu pada perencanaan pelaksanaan ini.

e-Delivery dalam standarisasi kontrak dan proses pencairan pekerjaan. Untuk meminimalkan kesalahan dalam pembuatan kontrak yang digunakan oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja, telah disiapkan standar kontrak sesuai jenis pekerjaan yang telah direview oleh Ahli Hukum Kontrak. Selain itu, *e-Delivery* digunakan untuk proses pengisian kemajuan pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa yang melakukan ikatan kontrak dengan SKPD/Unit Kerja dan proses pencairan pekerjaan. Sejak tahun 2013 *e-Delivery* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-Payment* yang dikembangkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk proses pencairan selanjutnya secara elektronik yaitu pembukuan, pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

e-Controlling untuk proses monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD/Unit Kerja dengan melihat data perencanaan yang telah disusun di *e-Project Planning* dengan data realisasi yang disusun di *e-Delivery*. Data realisasi anggaran per kegiatan per SKPD/Unit Kerja disajikan secara *real time*.

e-Performance untuk proses pengukuran kinerja PNS dengan menghilangkan honorarium pada belanja langsung dan merubah ke bentuk uang kinerja sehingga apabila PNS tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan maka akan berpengaruh ke *take home pay* PNS tersebut. Kinerja



dari berbagai pejabat yang menjadi penanggung jawab dari program dan kegiatan, diformalkan melalui sarana *e-Performance* ini. Penetapan Kinerja berupa rencana target capaian dicantumkan dalam *Scorecard* Kinerja. Kemajuan kerja dimutakhirkan secara teratur berkala, dan berdasarkan hal ini kinerja individu pejabat yang bertanggung jawab atas setiap program dan kegiatan menjadi terpantau secara transparan. Remunerasi seluruh pejabat dan staf dilindungi Pemerintah Kota Surabaya menjadi terkait dengan data kinerja yang diolah oleh modul *e-Performance* sesuai dengan level kinerjanya masing-masing.

2. Tahap Penerapan GRMS

GRMS dibangun dan dikelola oleh Bagian Bina Program dibawah langsung Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya dan diterapkan secara bertahap:

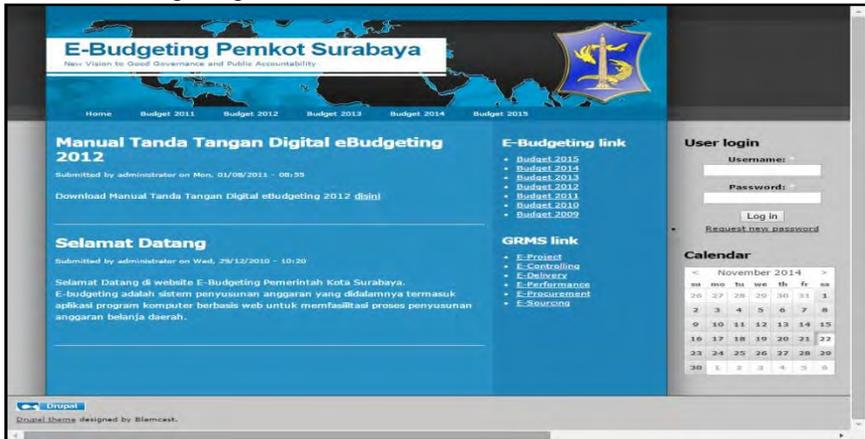
1. Tahapan penerapan module dimulai dari *e-Procurement* yang mulai diterapkan pada tahun 2004. Masyarakat pengusaha yang dianggap lebih terdidik dan lebih terbuka untuk menerima inisiatif perubahan, secara bertahap dan pada akhirnya menjadi diwajibkan penuh menggunakan sarana *e-Procurement*, jika akan berpartisipasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan program pembangunan. Pada tahap awal mereka didampingi penuh oleh tim dari Bagian Bina Program untuk menjadi terbiasa menggunakan sarana *e-Procurement*.

No	Nama Paket	Agency	HPS	Tanggal Download
1	Pemakaian Bandwidth 10 Mbps (Stackup Link Internet)	LPSE Kota Surabaya	425,32	22 Dec - 5 Jan 2015
2	Sewa alat dan jaringan hotspot	LPSE Kota Surabaya	440,74	22 Dec - 5 Jan 2015
3	Pembangunan Gedung Type B (SDN ULUNG V NO 30, SDN ULUNG VI 31, SDN ULUNG VII NO 32 SURABAYA, SDN ULUNG VIII NO 33, SDN ULUNG IX NO 34, SDN ULUNG X NO 35 SURABAYA)	LPSE Kota Surabaya	746,92	22 Dec - 5 Jan 2015
4	Pembangunan Gedung Type B (SDN KREMBANGAN SELATAN K)	LPSE Kota Surabaya	2,16 M	22 Dec - 5 Jan 2015
5	Pembangunan Gedung Type B (SDN Wokojo V No 316)	LPSE Kota Surabaya	3,15 M	22 Dec - 5 Jan 2015
6	Pembangunan Gedung Type B (SDN Kapasan V)	LPSE Kota Surabaya	1,51 M	22 Dec - 5 Jan 2015
7	Pembangunan Gedung Type B (SDN Dr. Sutomo I, II, III, IV)	LPSE Kota Surabaya	1,06 M	22 Dec - 5 Jan 2015
8	Pembangunan Gedung Type B (SDN Keputran 3)	LPSE Kota Surabaya	2 M	22 Dec - 5 Jan 2015
9	Pembangunan Gedung Type B (SDN Tembok Dukuw III)	LPSE Kota Surabaya	1,19,99 M	22 Dec - 5 Jan 2015
10	Biaya Perencanaan Nilai Pekerjaan 2 M - 5 M (Gedung di Rayon DPUSM Tegalsari)	LPSE Kota Surabaya	185,26	22 Dec - 2 Jan 2015
11	Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 5 M (Paket C)	LPSE Kota Surabaya	185,26	22 Dec - 2 Jan 2015
12	Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 5 M (Paket B)	LPSE Kota Surabaya	185,26	22 Dec - 2 Jan 2015
13	Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 5 M (Paket A)	LPSE Kota Surabaya	315,28	22 Dec - 2 Jan 2015
14	Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 10 M (Paket B)	LPSE Kota Surabaya	315,28	22 Dec - 2 Jan 2015
15	Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 10 M (Paket A)	LPSE Kota Surabaya	801,13	22 Dec - 2 Jan 2015
16	Pemakaian Bandwidth Server 20 Mbps	LPSE Kota Surabaya	429,14	22 Dec - 5 Jan 2015
17	Pembangunan Gedung Type C (Gedung Serbaguna Eks SDN Ujung DC K 20)	LPSE Kota Surabaya	677,3	22 Dec - 5 Jan 2015
18	Pembangunan Gedung Type C (Kantor Kecamatan Kengiran)	LPSE Kota Surabaya	661,9	22 Dec - 5 Jan 2015
19	Pembangunan Gedung Type C (Kecamatan Wosocolo)	LPSE Kota Surabaya	736,48	22 Dec - 5 Jan 2015
20	Pembangunan Gedung Type C (Kantor Kelurahan Genteng)	LPSE Kota Surabaya	1,4 M	22 Dec - 5 Jan 2015
21	Pembangunan Gedung Type C (Kantor Kelurahan Embong Kalasan)	LPSE Kota Surabaya	999,48	22 Dec - 5 Jan 2015
22	Pembangunan Gedung Type B (Masjid Mujaqqin)	LPSE Kota Surabaya		22 Dec - 5 Jan 2015

2. Selanjutnya diterapkan *e-Budgeting*. Seluruh pejabat dilindungi Pemerintah Kota Surabaya secara bertahap dan pada akhirnya menjadi diwajibkan penuh untuk menyusun rencana anggaran dan penetapan alokasi anggaran menggunakan sarana *e-Budgeting*.



Pada tahap awal seluruh pejabat tersebut didampingi penuh oleh tim dari Bagian Bina Program untuk menjadi terbiasa menggunakan sarana *e-Budgeting*.



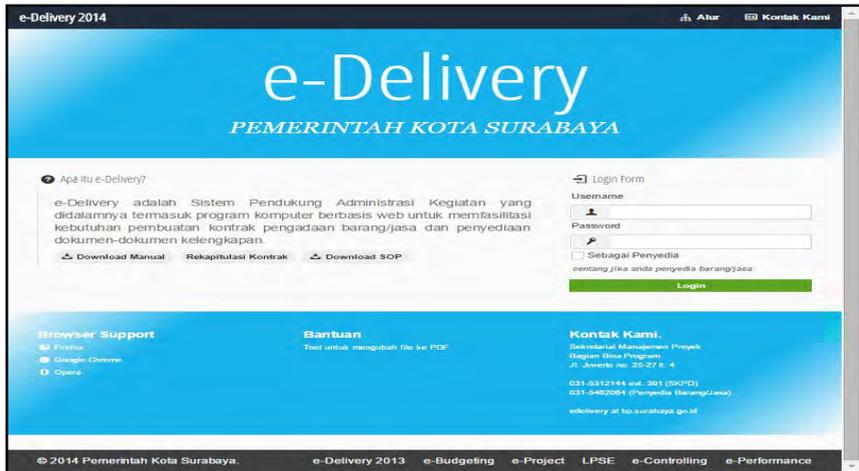
3. Penerapan *e-Project Planning*. Seluruh pejabat dilindungi Pemerintah Kota Surabaya secara bertahap dan pada akhirnya menjadi diwajibkan penuh untuk menyusun pemaketan pekerjaan / Rencana Umum Pengadaan (RUP) menggunakan sarana *e-Project Planning*. Pada tahap awal seluruh pejabat tersebut didampingi penuh oleh tim dari Bagian Bina Program untuk menjadi terbiasa menggunakan sarana *e-Project Planning*.



4. *e-Delivery*. Rekanan Pemerintah Kota Surabaya secara bertahap dan pada akhirnya menjadi diwajibkan penuh menggunakan sarana *e-Delivery* dalam melakukan proses kontrak, penagihan pembayaran yang dikaitkan dengan tingkat kinerja penyelesaian



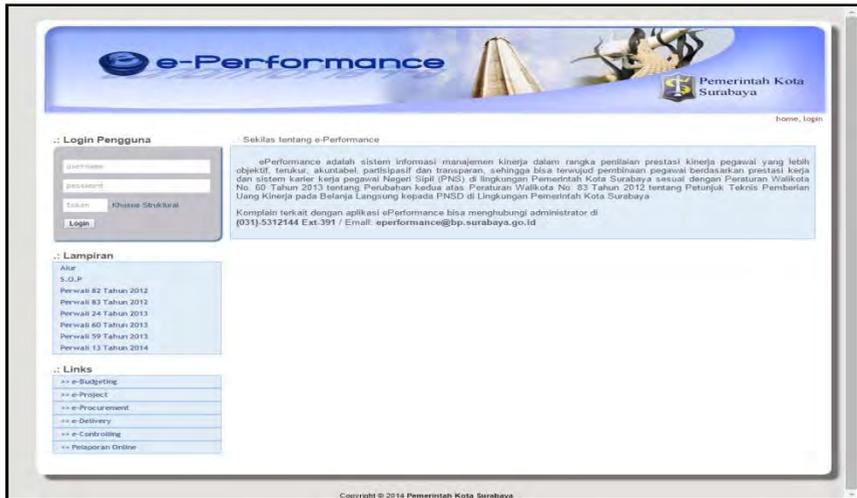
program/kegiatan. Pada tahap awal mereka didampingi penuh Bagian Bina Program untuk menjadi terbiasa menggunakan sarana *e-Delivery*.



5. *e-Controlling*. Seluruh pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya secara bertahap dan pada akhirnya menjadi diwajibkan penuh untuk melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan dari setiap kegiatan di SKPD nya menggunakan sarana *e-Controlling*.



6. Selanjutnya penerapan *e-Performance*. Seluruh pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya secara bertahap dan pada akhirnya menjadi diwajibkan penuh untuk menyusun rencana capaian kinerja (Penetapan Kinerja atau PK) menggunakan sarana *e-Performance*. Pada tahap awal seluruh pejabat tersebut didampingi penuh oleh tim Bagian Bina Program untuk menjadi terbiasa menggunakan sarana *e-Performance*.



Seluruh pengguna/user GRMS tersebut didampingi penuh oleh tim dari Bagian Bina Program dengan diadakan pelatihan dan sosialisasi untuk menjadi terbiasa menggunakan sistem tersebut pada tahap awal. Sampai saat ini proses pendampingan tersebut tetap dilaksanakan, akan tetapi dengan mulai bertambahnya pemahaman dan pengetahuan pengguna maka proses tersebut dapat diminimalisasi.

Data pada GRMS saling terintegrasi dengan masing-masing aplikasi didalamnya, selain itu juga terintegrasi dengan aplikasi *e-Payment* dan *e-Simbada*.

Kebijakan Walikota Surabaya dan Sumber Daya

Kebijakan penerapan GRMS dituangkan dalam:

1. Peraturan Walikota Surabaya nomor 73 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya nomor 31 tahun 2014.
2. Peraturan Walikota Surabaya nomor 83 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya nomor 60 tahun 2013.

Sumber daya manusia perencana dan pelaksana pembangunan, utamanya adalah berasal dari lingkungan internal pejabat dan staf Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kekuatan pada infrastruktur jaringan internet, server (Web, Mail, Proxy, Data), kelembagaan yang mantap, serta dukungan komitmen pimpinan yang kuat, dan SDM yang bagus serta memiliki peluang terhadap teknologi informasi yang dapat memberikan efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam menjalankan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.



Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan dan Pendanaan

Dalam pelaksanaan GRMS melibatkan pihak-pihak antara lain:

1. Seluruh aparat Pemerintah Kota Surabaya mulai dari Kepala daerah dalam hal ini Walikota Surabaya dan didukung penuh oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surabaya beserta seluruh jajaran SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, mendukung penerapan GRMS dengan menggunakan aplikasi *e-Budgeting* pada saat proses pembahasan anggaran dan aplikasi *e-Controlling* pada saat proses monitoring pelaksanaan kegiatan.
3. Masyarakat Kota Surabaya, masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan melalui *e-Musrenbang* dan juga dapat memantau proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *e-Procurement*. Serta dapat melihat jumlah paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui eProject Planning.
4. Pihak penyedia barang/jasa, pengguna GRMS yang mengikuti proses pelelangan dan yang melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen di SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya *e-Procurement* dan *e-Delivery*.

Pendanaan untuk pengembangan GRMS berasal dari dana APBD murni dan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan secara bertahap. Pendanaan meliputi :

1. Infrastruktur teknologi informasi berupa perangkat keras, lunak dan jaringan yang menjamin akses para pihak dalam pelaksanaan eProcurement;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sehingga menjadi support dalam pelaksanaan sistem, baik dari segi administrasi, teknis maupun layanan.

Tim Pemantau Kemajuan dan Evaluasi Kegiatan

GRMS dipergunakan oleh seluruh SKPD/Unit Kerja di Pemerintah Kota Surabaya, dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Bagian Bina Program, Badan Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Bagian Hukum dalam rangka koordinasi pelaksanaan GRMS, khususnya permasalahan dalam pelaksanaan APBD.

Kendala Yang Dihadapi

Pada saat awal diterapkan, terjadi tentangan yang sangat keras, baik dari lingkungan pejabat, maupun pengusaha yang umumnya adalah pengusaha bermodal kuat yang mudah menyalurkan opininya melalui media massa maupun kelompok masyarakat yang didanainya untuk menggagalkan program ini.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terklasifikasi dan terqualifikasi untuk dapat menjalankan, memelihara dan mengembangkan aplikasi teknologi informasi, cenderung menolak.

Perubahan budaya kerja dari manual ke elektronik menimbulkan kekuatiran kehilangan kesempatan berkarir dengan adanya model bekerja yang baru.



Sebelum adanya inisiatif, mental “PNS gaji kecil tapi ceperan banyak” yang cenderung membuat jalur proses sendiri yang rumit (membuat ‘sistem’ banyak meja untuk pengurusan-pengurusan), tenaga di bidang ICT di lingkup Pemda masih sangat langka, data base masih jalan sendiri-sendiri, bahkan sebagian besar masih paperbase bukan paperless.

Konsultan aplikasi sering kesulitan menemukan apa maunya pihak internal terutama dalam hal menganalisa sistem.

Upaya Menghadapi Kendala

Perubahan budaya diupayakan dengan cara pemaksaan proses bisnis tertentu, yang dikaitkan dengan kepentingan organisasi dan difasilitasi melalui aplikasi elektronik GRMS dengan modul-modul yang sesuai.

Pembuatan GRMS dilakukan sendiri melibatkan programmer internal dan outsourcing, yang *disupport* oleh pemakaian aplikasi *Free/Open Source Software* untuk sistem operasi/*operating system* maupun *database* dan pembuatan infrastruktur jaringan antar SKPD Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya selalu memberikan pelatihan dan sosialisasi secara cuma-cuma akan berbagai modul aplikasi GRMS kepada seluruh pengguna/*user* aplikasi tersebut dan disediakan layanan *helpdesk* dengan fasilitas telepon, email, fax, maupun fasilitas layanan tatap muka langsung dalam rangka memberikan informasi bagi pengguna/*user* terkait penggunaan aplikasi atau pemberian informasi regulasi-regulasi yang terbaru.

Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai dengan penerapan GRMS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diantaranya:

1. Harga yang terukur, terstandar, dan sesuai dengan jenis dan pengelompokannya (Standar Harga Satuan Daerah);
2. Efisiensi anggaran dan program kerja disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Terencana dan terlaksananya kegiatan dan program kerja sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan;
4. Terciptanya proses lelang yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel sehingga terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Terseragamnya bentuk pencairan keuangan, jenis, dan cara pembayaran dalam kontrak yang terstandar;
6. Peningkatan disiplin, motivasi, dan kreativitas dalam kinerja aparatur Pemerintah Kota Surabaya.

Dan secara keseluruhan yang dihasilkan adalah:

1. Penganggaran lebih tepat sasaran, dapat dilakukan penghematan, efisiensi dan percepatan dalam proses penyusunan anggaran yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan kegiatan telah tersusun sehingga memudahkan SKPD/Unit Kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dan masyarakat dapat memantau kapan pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP);



3. Proses pengadaan barang/jasa hingga tanggal rencana serah terima pekerjaan dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat umum melalui aplikasi *e-Procurement*;
4. Pelelangan terdapat penghematan anggaran sebesar 20-30% setiap tahun anggaran yang kemudian sisa anggaran tadi dapat dianggarkan kembali pada saat Perubahan Anggaran Keuangan untuk mengoptimalkan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi;
5. Meningkatnya kinerja PNS, karena cara kerja PNS tidak lagi berbasis honor tetapi berbasis kinerja, sehingga secara umum meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat;
6. Masyarakat Kota Surabaya dapat aktif memberikan masukan dan aspirasi dalam proses penyusunan perencanaan melalui e-Musrenbang;
7. Melalui e-Procurement menjadikan siapapun memiliki peluang yang sama untuk mengikuti proses tender. Transparansi ini menjadikan terjadi persaingan kompetitif antar pengusaha, yang menjadikan harga yang ditawarkan bersifat harga kompetitif. Manfaat yang dirasakan Pemerintah Kota Surabaya, terjadi penghematan anggaran pengadaan sarana dan prasarana, dalam persentasi total anggaran, (termasuk peningkatan kualitas barang/jasa yang diterima).

Keberlanjutan

GRMS ini digunakan oleh seluruh unsur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja, meliputi:

1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
5. Pejabat Pengadaan;
6. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
7. Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Khusus untuk *e-Performance*, digunakan oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, semua SKPD/Unit Kerja wajib menggunakan GRMS dan tidak difasilitasi untuk melaksanakannya secara manual. Ketika terjadi mutasi pegawai, baik di tingkat staf maupun pejabat, maka staf/pejabat lainnya dapat dengan segera meneruskan penerapan GRMS di lingkungan tempat kerjanya. Hal ini disebabkan SKPD/Unit Kerja telah menyiapkan SDM secara baik untuk menggunakan GRMS, karena jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik oleh SKPD/Unit Kerja maka akan mempengaruhi kinerja (*take home pay*) seluruh PNS di SKPD/Unit Kerja tersebut.

Pelajaran Yang Dapat Diambil

Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa keikutsertaan masyarakat yang ditanggapi dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah akan memperlancar pelaksanaan sebuah program dan mengurangi beban pemerintah itu sendiri.



Perbaikan dan pengembangan pengelolaan pemerintahan yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat menjadi tujuan utama.

Berbagai metode yang dapat meningkatkan kecepatan waktu respon terhadap masalah kota, pemenuhan persyaratan teknis barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat, keterbukaan proses pengambilan kebijakan publik, akuntabilitas kinerja instansi-instansi di lingkup pemerintahan dan lain-lain indikator kualitas layanan publik diterapkan secara bertahap agar masyarakat melihat bahwa pemerintahnya sangat bersungguh-sungguh melayani kepentingan dan kebutuhannya.

Pemerintah Kota berpendapat jika masyarakat merasakan ada peningkatan kualitas layanan, maka rasa memiliki dalam gerak langkah kesehariannya dapat tumbuh. Masyarakat akan bertambah yakin bahwa pajak yang selama ini dibayarkan akan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sehingga pendapatan daerah juga akan meningkat secara signifikan karena masyarakat akan taat dan rajin bayar pajak.

Selanjutnya, kualitas layanan akan semakin meningkat lagi sebagaimana reaksi berantai, karena dengan ketersediaan anggaran yang cukup pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendukung proses produksi layanan yang diinginkan oleh masyarakatnya karena Teknologi Informasi melalui GRMS memberikan kemudahan bagi pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah yg efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maupun dalam mendukung proses pengawasan dan pengendalian kinerja pemerintah Kota Surabaya dengan melibatkan warga kota selaku customer dari Pemerintah Kota Surabaya.

Kemampuan Untuk Ditransfer

Pada prinsipnya sistem GRMS dapat direplikasi/diadopsi oleh Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya, karena prosedur Pengelolaan Keuangan di Pemerintah adalah sama/sejenis dan pengembangan GRMS disesuaikan dengan prosedur pengelolaan keuangan di Pemerintah. Sistem GRMS Pemerintah Kota Surabaya telah diadopsi oleh beberapa Pemerintah Daerah dan Instansi lain, termasuk Kementerian/Lembaga, di tingkat nasional untuk dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing Pemerintah Daerah dan Instansi tersebut.

Kontak

1. Drs. Dedik Irianto, MM.

Kepala Bagian Bina program
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Jl. Jimerto No. 25 - 27, Lt. IV
Surabaya
Telp. (031) 5462064, 5312144 Psw. 363, 391
HP: 085230023422
Email: dedik@bp.surabaya.go.id

**2. Ika Tisnawati, ST**

Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian
Bagian Bina program
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Jl. Jimerto No. 25 - 27, Lt. IV
Surabaya
Telp. (031) 5462064, 5312144 Psw. 363, 391
HP: 081332564715
Email: ika.tisnawati@bp.surabaya.go.id

3. Ir. Antiek Sugiharti, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya
Jl. Jimerto No. 25-27 Lt.V
Surabaya
Telp. (031) 5450082, 5312144 Psw. 384, 527, 232, 164
Fax. (031) 5450154
HP: 0811 334 442, 0856 3222 319
Email: antiek_y@yahoo.com, antieksby@gmail.com

4. Hefli Syarifuddin Madjid, SE., M.Si

Kepala Bidang Aplikasi dan Data Base
Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya
Jl. Jimerto No. 25-27 Lt.V
Surabaya
Telp. (031) 5450082, 5312144 Psw. 384, 527, 232, 164
Fax. (031) 5450154
Hp: 0813 3059 3600, 0816 543 5493, 031 7061 0304
Email: helfi.sf@gmail.com

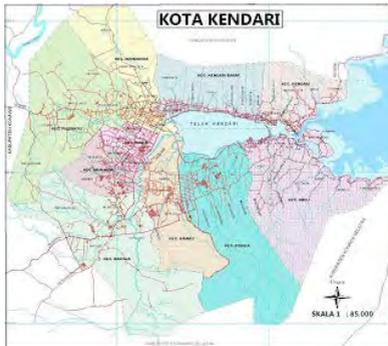
5. Devy Munir

Komunikasi dan Informasi APEKSI
Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960
Telp. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733
Email: devy.munir@apekti.or.id



PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI ENERGI ALTERNATIF KOTA KENDARI

Profil Kota



Terbentuknya Kota Kendari diawali dengan terbukanya Teluk Kendari menjadi pelabuhan bagi para pedagang, khususnya pedagang Bajo dan Bugis yang datang untuk berdagang sekaligus bermukim disekitar Teluk Kendari. Fenomena ini juga didukung oleh kondisi sosial politik dan keamanan di daerah asal kedua suku tersebut di Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone.

Wilayah Kota Kendari dengan ibukotanya Kendari dan sekaligus berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, berada di antara 30° 54' 30" - 40° 3' 11" Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara 122° 23' - 122° 39' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah selatan berbatasan Kabupaten Konawe Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan.

Wilayah Kota Kendari terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi Wilayah daratannya sebagian besar terdapat di daratan pulau Sulawesi mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau yaitu Pulau Bungkutoko. Luas wilayah daratan kota Kendari 295,89 KM² atau 0,70 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jumlah penduduk berdasarkan data BPS pada tahun 2012 adalah 304.862 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 153.922 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 150.940 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahun sebesar 3,09 persen.

Situasi Sebelum Inisiatif

Seperti ibukota provinsi lainnya, Kota Kendari memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Kondisi ini lebih disebabkan oleh urbanisasi yang masuk ke Kendari. Seperti diketahui bahwa sebagai kota terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Kota Kendari menjadi sumber kehidupan utama bagi provinsi



tersebut, seperti menjadi pusat dalam mencari pekerjaan, pendidikan, kesehatan maupun bisnis lainnya.

Secara nasional Kota Kendari berada pada kategori kota yang memiliki tingkat kebersihan rendah dibanding dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun. Sehingga, Kota Kendari belum pernah memperoleh Adipura sebagai salah satu penghargaan kebersihan. Sedangkan dari aspek sosial masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya membuang sampah. Dengan terus meningkatkan jumlah penduduk di Kota Kendari, juga disertai dengan peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya, maka persoalan sampah menjadi salah satu persoalan utama kota. Secara umum kondisi sarana dan prasarana persampahan yang terjadi di Kota Kendari adalah sebagai berikut:

- TPA yang ada memiliki kondisi yang kurang memadai sebagai tempat pembuangan sampah, sementara jumlah sampah terus meningkat.
- TPA masih menggunakan sistem *open dumping*.
- TPA belum memiliki pembagian zona (sesampah).
- Belum dilaksanakannya pengolahan sampah/pemilahan dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Masih sering dilakukannya pembakaran sampah.
- Minimnya sosialisasi tentang kesadaran membuang sampah.

Berikut adalah jumlah produksi sampah setiap tahunnya hingga 2013:

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2006 - 2013 Kota Kendari (m³)

Tahun	Jumlah sampah yang ditangani (m ³ /hari)	Jumlah volume produksi sampah (m ³)	%
2006	160.600	216.934	74,032
2007	160.600	223.015	72,013
2008	207.320	225.205	92,058
2009	456.517	652.168	70,00
2010	507.440	724.915	70,00
2011	517.539	739.343	70,00
2012	533.508	762.155	70,00
2013	726.584	1.037.978	70,00

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Kendari Tahun 2013

Inisiatif

Berangkat dari permasalahan di atas, DR. Ir. Asrun, M.Eng, Sc selaku walikota memprakarsai pengelolaan sampah menjadi energi alternatif berupa gas metan. Inisiatif ini diinspirasi dari berbagai tempat yang berhasil mengolah sampah menjadi biogas seperti di Brazil dan kota Malang. Prakarsa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemetaan kondisi persampahan, melakukan pengembangan teknologi pemrosesan sampah menjadi gas metan kemudian merancang pemanfaatan gas metan tersebut untuk masyarakat.

Pengelolaan sampah menjadi energi alternatif ini dilihat sebagai salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Kendari. Inovasi ini selain sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, juga turut memfasilitasi masyarakat kurang mampu seperti para pemulung dengan



memberikan penerangan listrik di rumah dan energi untuk keperluan memasak secara gratis, yang langsung dihubungkan melalui instalasi pipa ke rumah-rumah dan tempat-tempat memasak masyarakat di sekitar TPA.

Strategi yang Diterapkan

Perencanaan hingga implementasi konkret Inovasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Alternatif ini mulai dilakukan pada tahun 2009 hingga 2010. Perjalanan inovasi tersebut memiliki proses awal yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tahapan yang dilaksanakan dalam menjalankan pengolahan sampah menjadi energi ini adalah sebagai berikut:

- Identifikasi masalah dilaksanakan melalui survei untuk memperoleh data besaran jumlah sampah yang diproduksi masyarakat setiap harinya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif.
- Pengolahan sampah Organik menjadi Kompos dan Sampah An-Organik. Sementara sampah organik diolah menjadi bahan baku biogas, sampah yang tidak tertangani setelah dipulung, dipilah, kemudian dikelola dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) oleh kelompok-kelompok perajin yang tersebar di beberapa titik di Kota Kendari. Tak jarang pula sampah an organik ada sebagian yang langsung dijual kepada pengumpul di luar Kota Kendari, misalnya Kota Surabaya, untuk didaur-ulang.



Pengelolaan sampah menjadi barang yang bermanfaat

- c. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok kebersihan Lingkungan Kelompok tersebut berjumlah 12 kelompok, dengan anggota bervariasi sekitar 10 sampai 15 orang.
- d. Pengolahan sampah menjadi Gas Metan di Kendari memiliki alur sederhana sebagai berikut:





Gas tersebut disalurkan melalui pipa ke pemukiman masyarakat untuk keperluan penerangan dan memasak sehari-hari rumah tangga pemulung sekitar TPA, kemudian penerangan di kawasan TPA dari genset berkapasitas 7000 watt, pada awal 2011.



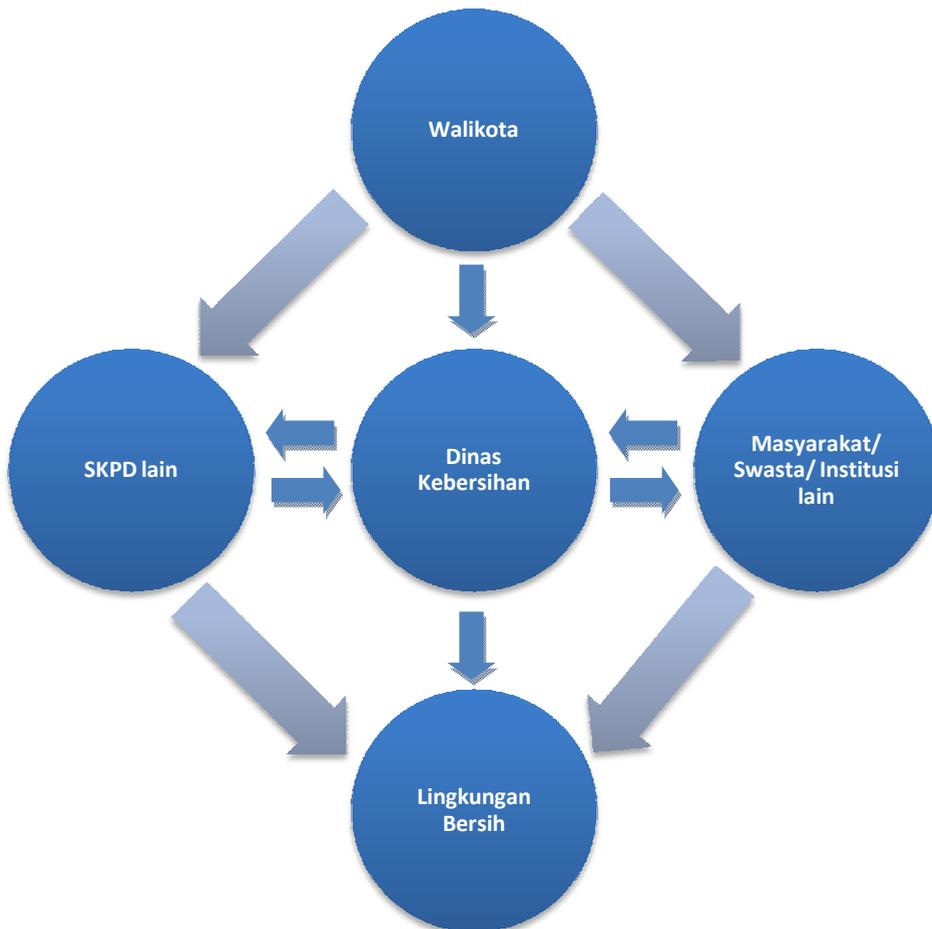
Proses pengelolaan sampah dengan pemanfaatan Gas Metan sebagai bahan bakar



Untuk mengolah sampah-sampah tersebut menjadi gas metan, Pemkot Kendari menggunakan sumberdaya manusia dari Dinas kebersihan Kota Kendari yang telah dididik dan dilatih untuk mengembangkan biogas. Namun dalam mendesain dan merencanakan program ini pemkot melibatkan Institut Teknologi dalam bentuk studi persampahan. Untuk menjamin kepastian secara hukum, program ini didukung dengan PERWALI NOMOR 21 TAHUN 2009 Tentang Kawasan Tertib Sampah.

Untuk skema pendanaan program pengolahan sampah ini dituangkan sejak proses perencanaan yang dimulai dengan usulan dari SKPD yang dituangkan dari Renja SKPD dan Renstra lima tahunan.

Selanjutnya Renstra tersebut dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk dilaksanakan pada tahun berkenaan.



Skema Pendanaan

**Penggunaan Anggaran Setiap Tahun untuk Pengembangan Gas Metan**

NO	TAHUN	URAIAN	JUMLAH/TAHUN	ANGGARAN INSTALASI GAS METHAN
1	2009	PENATAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)	115,477,900	98,579,400
2	2010	PENATAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)	70,470,000	-
3	2011	PENATAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)	612,871,960	-
4	2012	PENATAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)	255,000,000	-
5	2013	PENATAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)	802,343,800	325,000,000
6	2014	PENATAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)	1,368,953,000	92,000,000
JUMLAH			3,225,116,660	515,579,400

Selain pendanaan dari APBD, program ini juga mendapat dukungan pendanaan dari luar yaitu:

- Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2009-2010 berupa fasilitasi studi banding dan peningkatan kapasitas aparat Dinas Kebersihan;
- GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*) berupa studi awal potensi gas metan (GRK sektor persampahan perkotaan di Kota Kendari senilai Rp 200.000.000) yang melibatkan Konsultan dari ITB bekerjasama dengan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan GIZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TPA Puuwatu Kota Kendari memiliki potensi emisi CO₂ sebesar 149.372,680 kg/thn, CH₄: 1.273.726,403 kg/th dan N₂O: 117,208 kg/thn sehingga secara total potensi CO₂ : 26.933.862 kg/th, dimana emisi gas rumah kaca didominasi dari aktifitas penimbunan sampah dan pembakaran sampah secara terbuka dan pengomposan.
- Selain itu pendanaan dari CSR perusahaan dengan melakukan koordinasi dan sinergi antara program persampahan Kota Kendari dengan Program CSR perusahaan.

Dalam menjalankan program pengolahan sampah menjadi energi alternatif bukanlah tanpa kendala. Jika dicermati ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemkot Kendari antara lain:

- Kurangnya sumber daya manusia berkaitan dengan inovasi yang lebih luas pada kawasan-kawasan permukiman lainnya;
- Masih memerlukan peralatan untuk pengembangan dan keberlanjutan program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Alternatif di Kota Kendari;
- Memerlukan sumber-sumber pendanaan yang lebih besar dalam rencana pengembangan perluasan pemanfaatan gas metan;
- Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya dalam memilah sampah organik dan non-organik.

Sementara itu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

- Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat . Secara formal sosialisasi dilakukan melalui kegiatan monitoring oleh Dinas



Kebersihan 2 (dua) kali dalam seminggu., biasanya dilakukan pada hari Selasa dan Jum'at yang merupakan hari kerja bakti bagi setiap instansi pemerintahan lingkup Pemkot Kendari. Sedangkan secara informal dilakukan setiap hari oleh staf Dinas Kebersihan yang secara bergiliran melakukan monitoring terhadap kebersihan kota.

- Menganggarkan pendanaan kebersihan secara bertahap yaitu perencanaan yang dilakukan sesuai dengan program yang ada di masing-masing SKPD, khususnya Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari setiap tahunnya tentang pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan utamanya gas metan yang telah tertuang dalam APBD, sesuai kondisi, sasaran dan target yang hendak dicapai dalam setiap tahunnya.
- Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengelolaan sampah pada sekolah-sekolah, lembaga pemerintah lainnya serta swasta dan LSM.
- Membagi wilayah binaan di Kota Kendari kepada seluruh SKPD sebagai wilayah tanggungjawab masing-masing terhadap kebersihan.
- Mengatasi masalah pendanaan kebersihan dengan mengarahkan atau memanfaatkan dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kendari, baik untuk kegiatan penghijauan maupun penyediaan sarana dan prasarana. Sejauh ini dunia usaha yang telah ikut berpartisipasi adalah BCA, PT. Pertamina, PT. Jasa Rahrja, Bank Panin, BNI, PT. Pelindo, dan ASKES.



Program-Program CSR

Hasil yang Dicapai

Setelah melalui beberapa langkah untuk mengelola sampah menjadi gas metan hingga saat ini dapat dilihat hasilnya berupa :

1. Terwujudnya beberapa lokasimandiri energi melalui pemanfaatan limbah menjadi energi alternatif dalam bentuk Teknologi Biogas sejumlah 14 Unit yang tersebar di 7 wilayah yaitu TPST PA Puuwatu, TPST BTN Beringin, TPST Lahundapape, TPST Pasar Baruga, TPST Perumahan Graha Asri, TPST Perumahan PNS Baruga, dan TPST Perumnas Saranani. Terdapat juga program-program *pilot project* pada beberapa kawasan pemukiman, antara lain Kel. Watulondo 2 unit, Lapas Baruga dan Kel. Watubangga, Kel. Rahandauna. 1 Unit.



2. Terbentuknya kampung mandiri energi berpusat di Kel. Puuwatu, Kec Puuwatu yang melayani penerangan listrik masyarakat dan jalanan menuju TPA serta keperluan memasak terhadap 126 KK dengan jumlah 40 KVA atau 40.000 Watt listrik. Sedangkan untuk gas memasak berjalan selama 24 jam.
3. Efisiensi biaya rumah tanggayang dapat dicapai sesuai berhitungn sebagai berikut:

Diasumsikan pengeluaran rutin masyarakat miskin 126 KK sebelum menggunakan gas metan adalah:

Penggunaan gas untuk masak memasak 12 Kg/bulan	Rp 126.000,-
Penggunaan listrik untuk penerangan per bulan	Rp 120.000,-
Total pengeluaran satu bulan per rumah tangga	Rp 246.000,-
Efisiensi biaya perbulan 126 KK x Rp 246.000,-	Rp 30.996.000,-

Meskipun kalkulasi di atas terbilang sederhana tapi paling tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi energi alternatif ini sudah jelas membawa efek positif dalam jangka panjang tentunya. Dimana jumlah penduduk bertambah dengan cepatnya pasti disertai dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Jika inovasi ini terus dijalankan ataupun dikembangkan, maka memberi peluang besar penggunaan gas metan akan bersifat massal.

Dampak positif dari pengelolaan sampah menjadi gas ini adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak seperti minyak tanah, Sebagai ilustrasi jika menggunakan gas metan maka masyarakat hanya memerlukan biaya Rp 6.000/liter (untuk keperluan penerangan), sedangkan dengan menggunakan kayu bakar dan tungku arang memerlukan biaya Rp40.000/karung arang (untuk keperluan memasak yang setidaknya memerlukan pembelanjaan 2 -3 hari sekali.

4. Kampung mandiri energi tersebut adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota untuk dihuni oleh 126 KK yang semuanya berprofesi sebagai pemulung sampah dengan status lahan pinjam pakai selama 10 tahun. Hal ini ditetapkan dengan harapan suatu saat, para pemulung tersebut harus hidup mandiri melalui stimulan yang diberikan oleh pemerintah. Rumah-rumah yang mereka tempati pun dibangun melalui bantuan Kementerian Perumahan Rakyat (melalui Dinas Sosial) dan sebagiannya sumbangan CSR dari BCA.



Stasiun Pengisian Gas Metan Gratis



Rumah-rumah di Kasawan Kampung Mandiri Energi Kel. Puuwatu



5. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Puuwatu kini telah berubah menjadi kawasan wisata, yang dari tempat tersebut kita dapat menyaksikan kota Kendari dari kejauhan.



Jalan masuk ke TPA Puuwatu



Pemandangan di TPA Puuwatu

6. Perkembangan pengolahan sampah menjadi energi alternatif di Kota Kendari, telah membuahkan banyak hasil yang berdampak pada kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah kota mulai banyak diberikan ruang untuk mempresentasikan program mereka di berbagai forum, salah satunya di Bangkok pada Juli 2014 dan telah menghasilkan sebuah penghargaan yang cukup bergengsi dari 8 (delapan) kementerian yaitu AMPL Award pada tahun 2013, di samping Adipura Kencana pada tahun 2014, yang mana TPA menjadi salah satu titik pantau.

Keberlanjutan

Dengan berhasilnya Pemkot Kendari mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna yaitu gas untuk kebutuhan rumah tangga, jelas bahwa program tersebut membutuhkan dukungan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Untuk itu Pemkot Kendari telah merancang beberapa rencana tindak lanjut berupa:

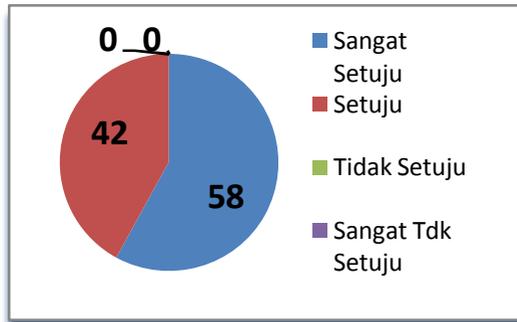
1. Payung hukum untuk menjamin keberlanjutan inovasi adalah program pengelolaan sampah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah Kota Kendari (RPJMD 2012-2017 dan RPJP tahun 2025 yang sudah diperdakan).



2. Rencana pengembangan selanjutnya adalah:
 - a. Membentuk Kampung Mandiri Energi lainnya di berbagai tempat di Kota Kendari, termasuk tempat-tempat layanan publik seperti pasar dan lain-lain yang banyak menghasilkan sampah, melalui sinergi dengan perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR;
 - b. Mengembangkan pengelolaan sampah menjadi gas metan skala industri potensi sebagai pembangkit listrik \pm 1 - 2 mw dengan melibatkan pihak swasta untuk melakukan investasi;
 - c. Pengolahan sampah organik menjadi kompos skala industri melalui kerjasama dalam bentuk investasi oleh pihak swasta.
3. Skema pendanaan inovasi tersebut masih melekat pada RPJMD Kota Kendari yang direncanakan sampai dengan 2017.
4. Salah satu cara untuk menjamin keberlanjutan program pengolahan sampah ini terutama paska 2017, Pemkot Kendari akan menjalin kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengembangkan energi alternatif yang dihasilkan TPA. Dengan melibatkan dua lembaga besar tersebut, diharapkan terus ada pengembangan dari inovasi ini.

Sebagai gambaran dan tugas untuk menjamin keberlanjutan program pengolahan sampah ini, maka dilakukan survei untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Kendari yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Penduduk Kampung Mandiri Energi tentang Penggunaan Gas Metan untuk memasak dan listrik



Pendapat Penduduk Mandiri Energi

2. Dukungan Kelanjutan Program di TPA Puuwatu:





Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas dilaksanakan dengan teknik *snowball* melalui instrumen pengisian angket oleh responden yang merupakan penduduk kampung mandiri energi kecamatan Puuwatu. Kepuasan masyarakat dapat terlihat dari persetujuan mereka tentang penggunaan gas metan untuk keperluan memasak dan penerangan listrik yang mencapai 58 dan 42 persen. Begitu pula adanya pernyataan sangat mendukung keberlanjutan program pengolahan sampah menjadi energi alternatif yang mencapai 84 persen dan mendukung sebesar 16 persen.

Pembelajaran yang Dapat Diambil

Pengolahan sampah menjadi gas metan sebenarnya sangat terkait dengan tiga misi, yaitu: (1). Menjaga terjadinya polusi tanah dari air lindi, sampah (2). Mencegah terjadinya polusi udara dari gas metan yang tidak digunakan, karena hal tersebut akan menimbulkan emisi gas rumah kaca dan menyumbang pemanasan global. (3). Misi yang paling penting adalah misi kemanusiaan, yaitu mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa penerangan listrik dan memasak setiap harinya.

Selain ketiga misi di atas, pelajaran lain yang dapat diambil dari pengelolaan sampah ini adalah ketersediaan bahan baku yang pasti tersedia setiap harinya. Semua daerah di Indonesia memilikinya, bahkan cenderung meningkat jumlahnya setiap tahun. Jika sampah tidak dimanfaatkan secara bijak, maka akan menjadi masalah besar nantinya. Tetapi jika dimanfaatkan dapat berguna bagi banyak orang.

Inovasi masalah persampahan ini terlihat mampu memberikan perubahan kepada masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, mereka dapat memahami bahwa sampah dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Bagi pemerintah, inovasi ini adalah metode pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sendiri potensi yang dimiliki dengan tidak sepenuhnya dibebankan pada pemerintah, sehingga program pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Kemampuan untuk Ditransfer

Mencermati proses pengolahan sampah menjadi gas metan, beberapa poin berikut dapat menjadi alasan kuat bahwa program ini memiliki kemampuan untuk direplikasi di daerah lain:

1. Inovasi ini memiliki metode dan teknologi yang sederhana dan dananya terjangkau oleh pemerintah daerah lain.
2. Pra kondisi yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mengubah menjadi gas metan. Hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Komitmen Pemerintah sangat jelas yang tertuang dalam Rencana Strategis dimana dalam cita-cita mewujudkan *Smart Green City*, pengelolaan lingkungan yang baik menjadi poin pertama yang harus dicapai dengan penganggaran yang jelas dalam setiap tahun anggaran dan senantiasa terus membangun hubungan, komunikasi dan kerjasama antara semua pihak dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak mengikat.
 - b. Penyediaan alat-alat kebersihan menjadi kewajiban pihak Pemerintah Daerah lewat SKPD, dimana penyediaannya disesuaikan dengan jenis



alatnya apakah bersifat barang yang sekali pakai dalam jangka menengah seperti 5 tahun sehingga diadakan rutin setiap tahun atau tiga tahun sekali dan seterusnya.

- c. Penyiapan lahan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan RTRW Kota, mengenai pengembangan SDM kapasitasnya terus menerus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diharapkan masalah-masalah yang akan dihadapi dimasa datang dapat ditangani dan dihadapi tanpa ada hambatan yang berarti.

Pengelolaan sampah dengan pemanfaatan limbah menjadi gas metan di Kota Kendari telah dikunjungi oleh berbagai unsur masyarakat, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Mereka yang pernah berkunjung dan belajar mengenai pengolahan sampah di Kendari adalah:

- Pemerintah La-rosche Prancis
- Asosiasi Ilmuan Manajemen Indonesia
- Walikota dan bupati seluruh Indonesia
- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komwil VI
- Kementrian Pekerjaan Umum
- ERC Australia
- Pemerintah Kabupaten Tebo Jambi
- Kementrian Lingkungan Hidup
- Masyarakat Kota Kendari
- Universitas Haluoleo
- Bappenas
- Pemkot Balikpapan
- Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Sulawesi Tenggara

Kontak

1. Ir. Askar, M.Si

Kepala Bappeda Kota Kendari
Jl. Drs. Abd. Silondae No. 8 Kendari
Telp. (0401) 3127361, Fax. (0401) 312736, HP. 085241753559
Email: bappedasosbud22@yahoo.co.id

2. Ir. Tin Farida

Kepala Dinas Kebersihan Kota Kendari
Balaikota III No 60 Kendari
Telp. (0401) 3123274, Fax. (0401) 312736, HP. 081341970600
Email: dinaskebersihankotakendari@gmail.com

3. A. Nur Fitri Balasong

Staf Informasi dan Komunikasi Sekretariat Bersama Komwil VI APEKSI
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2
Kantor Walikota Makassar, Balaikota Tower, Lantai 6
Makassar 90111
Telp. 0411 3616947, Fax. 0411 3616947
Email: sekber_komwil6@yahoo.co.id